



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 (16 Agustus – 7 September 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

f 23/9/24

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	4
C. FUNGSI PENGAWASAN	14
KOMISI III	20
D. FUNGSI LEGISLASI	20
E. FUNGSI ANGGARAN	22
F. FUNGSI PENGAWASAN	28
G. TUGAS KHUSUS	30
KOMISI IV	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33
B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	37

KOMISI V	39
A. FUNGSI LEGISLASI	39
B. FUNGSI ANGGARAN	39
C. FUNGSI PENGAWASAN	42
KOMISI VI	43
A. FUNGSI LEGISLASI	43
B. FUNGSI ANGGARAN	43
C. FUNGSI PENGAWASAN	46
KOMISI VII	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47
B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	52
KOMISI VIII	53
A. FUNGSI LEGISLASI	53
B. FUNGSI ANGGARAN	53
C. FUNGSI PENGAWASAN	55
KOMISI IX	59
A. FUNGSI LEGISLASI	59

B. FUNGSI ANGGARAN	59
C. FUNGSI PENGAWASAN	61
KOMISI X	65
A. FUNGSI LEGISLASI	65
B. FUNGSI ANGGARAN	65
C. FUNGSI PENGAWASAN	72
KOMISI XI	80
A. FUNGSI LEGISLASI	80
B. FUNGSI ANGGARAN	80
C. FUNGSI PENGAWASAN	92
BADAN LEGISLASI	95
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	98
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	120
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	121

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. BSSN 2. BAKAMLA	Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN dan Kepala Bakamla tanggal 2 September 2024 pukul 10.00 WIB.	Pembahasan RKA BSSN dan Bakamla TA 2025.	
2.	LEMHANNAS	RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas tanggal 2 September 2024 pukul 13.00 WIB.	Pembahasan RKA Lemhannas TA 2025.	
3.	1. Menhan RI 2. Panglima TNI	Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL, dan KASAU tanggal 3 September 2024 pukul 13.00 WIB.	Pembahasan RKA Kemhan dan TNI TA 2025.	
4.	1. LPP RRI 2. LPP TVRI 3. WANTANNAS	RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI dan Sesjen Wantannas tanggal 4 September 2024 pukul 10.00 WIB.	Pembahasan RKA LPP RRI, LPP TVRI dan Wantannas TA 2025	
5.	1. Menkominfo RI 2. KPI Pusat 3. KI Pusat 4. Dewan Pers	Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI dan dihadiri oleh Komisioner KPI Pusat, Komisioner KI Pusat serta Anggota Dewan Pers tanggal 4 September 2024 pukul 13.00 WIB.	Pembahasan RKA Kemkominfo TA 2025	
6.	Menlu RI	Pembahasan RKA Kemlu TA 2025 tanggal tanggal 5 September 2024 pukul 09.00.	Pembahasan RKA Kemlu TA 2025	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	BIN	Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN tanggal 11 September 2024 pukul 11.00 WIB.	Pembahasan RKA BIN TA 2025.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	1. LPP TVRI 2. TNI	1. LPP TVRI Jawa Barat 2. LPP TVRI DKI dan BANTEN 3. Korem 061/Surya Kencana Dilaksanakan pada 27 – 29 Agustus 2024.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke daerah sebagai berikut: 1. Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tema : “Kolaborasi Diskominfo Jawa Barat, LPP TVRI Jawa Barat, LPP RRI Bandung, KPI Pusat dan KPID Jabar dalam mengawasi Isi dan Konten Siaran Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat”. 2. Serang, Provinsi Banten. Tema : “Kolaborasi Diskominfo Banten, LPP TVRI DKI dan Banten, LPP RRI Serang, KPI Pusat dan KPID Banten dalam mengawasi Isi dan Konten Siaran Pilkada Serentak 2024 di Banten”. 3. Bogor, Provinsi Jawa Barat . Tema : “Kesiapan Korem 061/Surya Kencana Dalam Menciptakan Kondisi Wilayah Yang Tangguh Terhadap berbagai Kerawanan dan Potensi Ancaman, Termasuk Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Tugas”.	
2	KEMLU RI	1. KBRI Kuala Lumpur 2. KBRI Bangkok	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi I DPR RI ke Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam rangka Pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. KBRI Singapura Dilaksanakan pada 9 – 15 Agustus 2024.	Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, dan untuk memberikan penguatan Diplomasi Parlemen terhadap pelaksanaan Politik Luar Negeri RI	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kementerian Dalam Negeri b. BNPP c. DKPP d. OIKN	Rapat Dengar Pendapat (Konsinyering) Komisi II DPR RI dengan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2025 Berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN 2025, dan lain-lain, hari Senin, 2 September 2024.	<p>1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,- (<i>empat triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah</i>), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp89.271.812.000,- (<i>delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah</i>). Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri dan DKPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,- (<i>dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>). Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta BNPP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,- (<i>lima ratus lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>). Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta OIKN melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan OIKN sebesar Rp27.814.516.000.000,- (<i>dua puluh tujuh triliun delapan ratus empat belas miliar lima ratus enam belas juta rupiah</i>), dan mengamanatkan kepada anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.</p>	
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemenpan RB b. BKN c. LAN d. ANRI e. ORI 	<p>Rapat Dengar Pendapat (Konsinering) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI, Sekretaris Utama Badan kepegawaian Negara RI, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara RI, Sekretaris Utama Arsip Nasional RI, dan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, dengan agenda</p>	<p>1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN tahun 2025 yang diajukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar Rp359.980.127.000,- (<i>tiga ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i>); b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp798.342.991.000,- (<i>tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>); c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp315.388.668.000,- (<i>tiga ratus lima belas miliar tiga ratus</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>membahas RKA K/L Tahun 2025 Berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN 2025, dan lain-lain, hari Senin, 2 September 2024.</p>	<p><i>delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);</i></p> <p>d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp251.995.636.000,- (<i>dua ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);</i></p> <p>e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp232.211.019.000,- (<i>dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah);</i></p> <p>Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan ANRI sebesar Rp3.625.086.000,- (<i>tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah)</i> dari Program Dukungan Manajemen ke Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran RAPBN tahun 2025 yang diajukan sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian PANRB sebesar Rp116.078.076.000,- (<i>seratus enam belas miliar tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);</i></p> <p>b. BKN sebesar Rp100.000.000.000,- (<i>seratus miliar rupiah);</i></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. LAN sebesar Rp121.887.230.253,- (<i>seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah</i>);</p> <p>d. ANRI sebesar Rp239.366.284.000,- (<i>dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah</i>);</p> <p>e. ORI sebesar Rp201.728.215.000,- (<i>dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah</i>);</p> <p>Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi II DPR RI mengamanatkan kepada anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.</p>	
3.	Kementerian ATR/BPN	Rapat Dengar Pendapat (Konsinering) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal ATR/BPN RI, dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2025 Berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN 2025, dan lain-lain, hari Senin, 2 September 2024.	Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000,- (<i>enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah</i>). Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.	
4.	<p>a. Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>b. Sekretariat Kabinet</p> <p>c. KSP</p>	Rapat Dengar Pendapat (Konsinering) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet RI, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris	<p>1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN tahun 2025 yang diajukan sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sebesar Rp2.472.916.534.000,- (<i>dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah</i>) termasuk di dalamnya pagu anggaran Kantor Staf</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	d. BPIP	Utama BPIP RI, dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2025 berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN 2025, dan lain-lain, hari Selasa, 3 September 2024.	<p>Presiden (KSP) sebesar Rp118.376.119.000,- (<i>seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah</i>);</p> <p>b. Sekretariat Kabinet (Setkab) sebesar Rp428.946.313.000,- (<i>empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah</i>);</p> <p>Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Setneg, Setkab, dan KSP melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI belum dapat menyetujui pagu anggaran RAPBN 2025 yang diajukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp299.428.347.000,- (<i>dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan BPIP sebesar Rp100.000.000.000,- (<i>seratus miliar rupiah</i>), dan akan memahasnya secara mendalam pada rapat yang akan datang.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp124.784.952.000,- (<i>seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan mengamanatkan kepada anggota Banggar Komisi II DPR RI memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.</p> <p>4. Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran anggaran tahun 2024 dari satuan kerja KSP ke satuan kerja Sekretariat Kementerian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan sebesar Rp1.077.184.000,- (<i>satu miliar tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah</i>).</p>	
5.	<p>a. KPU RI b. Bawaslu RI</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat (Konsinering) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal KPU RI dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2025 berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN 2025, dan lain-lain, hari Selasa, 3 September 2024.</p>	<p>Komisi II DPR RI belum dapat menyetujui pagu anggaran RAPBN 2025 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2025 sebesar Rp3.062.311.327.000,- (<i>tiga triliun enam puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah</i>); 2. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) tahun 2025 sebesar Rp2.416.945.124.000,- (<i>dua triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah</i>); <p>Terhadap pagu anggaran RAPBN 2025 tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat yang akan datang.</p>	
6.	<p>a. Kementerian Dalam Negeri b. BNPP c. DKPP d. OIKN</p>	<p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. a.n. Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan</p>	<p>1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,- (<i>empat triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah</i>), termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,- (<i>delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua</i></p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Penyelenggara Pemilu RI, dan Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, hari Senin, 9 September 2024.	<p><i>belas ribu rupiah</i>), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.038.205.856.000,- (<i>dua triliun tiga puluh delapan miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah</i>). b. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp471.039.306.000,- (<i>empat ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah</i>). c. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp2.119.117.603.000,- (<i>dua triliun seratus sembilan belas miliar seratus tujuh belas juta enam ratus tiga ribu rupiah</i>). d. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp155.865.753.000,- (<i>seratus lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah</i>). <p>2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,- (<i>dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp233.632.179.000,- (<i>dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>). 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp33.503.352.000,- (<i>tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga juga tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,- (<i>lima ratus lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>), untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :</p> <p>a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368.441.452.000,- (<i>tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>).</p> <p>b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137.093.374.000,- (<i>seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar Rp27.814.516.000.000,- (<i>dua puluh tujuh triliundelapan ratus empat belas miliar lima ratus enam belas juta rupiah</i>), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) OIKN tahun 2025 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	a. Kementerian Sekretariat Negara b. Sekretariat Kabinet c. KSP	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, hari Senin, 9 September 2024.	1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 sebesar Rp2.472.916.534.000,- (<i>dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah</i>), termasuk di dalamnya pagu anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) tahun 2025 sebesar Rp118.376.119.000,- (<i>seratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah</i>), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.665.080.144.000,- (<i>satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah</i>); b. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp807.836.390.000,- (<i>delapan ratus tujuh miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>). 2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp124.784.952.000,- (<i>seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah</i>) dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian Sekretariat Negara tahun 2025 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp428.946.313.000,- (<i>empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah</i>), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :</p> <p>a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp390.297.391.000,- (<i>tiga ratus sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>);</p> <p>b. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp38.648.922.000,- (<i>tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Sekretariat Kabinet sebesar Rp164.310.895.000,- (<i>seratus enam puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>) dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Sekretariat Kabinet tahun 2025 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.</p>	
8.	Kementerian ATR/BPN	Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, dengan agenda penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil	Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000,- (<i>enam triliun empat ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah</i>), dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025, hari Senin, 9 September 2024.	yang diajukan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp13.042.618.000,- (<i>tiga belas miliar empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah</i>) dari Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan ke Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 berdasarkan program adalah sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000,- (<i>empat triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>); b. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2.021.808.943.000,- (<i>dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah</i>); c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp156.066.111.000,- sebesar (<i>seratus lima puluh enam miliar enam puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah</i>).	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kementerian Hukum dan HAM RI b. Kementerian Dalam Negeri c. KPU RI d. Bawaslu RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	e. DKPP RI	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda membahas Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai Pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, hari Minggu, 25 Agustus 2024.	Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU): Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.	
2.	a. Kementerian Dalam Negeri b. KPU RI c. Bawaslu RI d. DKPP RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plh. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda membahas surat	Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui: Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU):	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dari KPU terkait permohonan konsultasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pilkada, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, membahas permohonan konsultasi Rancangan Per-Bawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 2. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. <p>Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Wakil Wali Kota, dan lain-lain, hari Senin, 26 Agustus 2024	<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP RI.</p>	
3.	BPIP	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan BPIP, dengan agenda membahas terkait permasalahan seragam Paskibraka, dan lain-lain, hari Senin, 26 Agustus 2024.</p>	Terkait surat dari Kepala BPIP nomor 44/PR/VIII/2024/BPIP hal: permohonan penjadwalan ulang Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 26 Agustus 2024, maka RDP ini akan dijadwalkan kembali pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.	
4.	<p>a. Menteri PANRB b. BKN</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Plt. Kepala Badan</p>	<p>1. Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non ASN paling lambat pada Desember 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non ASN secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.</p> <p>2. Terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi PPPK, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Kepegawaian Negara RI, dengan agenda membahas Rancangan PP tindak lanjut UU ASN, dan lain-lain, hari Rabu, 28 Agustus 2024.</p>	<p>BKN memastikan seluruh tenaga non ASN diangkat menjadi PPPK tahun 2024 dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga non ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi PPPK. b. Tenaga non ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi, maka diangkat menjadi PPPK paruh waktu. <ol style="list-style-type: none"> 3. Terhadap tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN namun saat ini sudah berhenti bekerja karena kebijakan Pemerintah Daerah terkait anggaran dalam 2 (dua) tahun terakhir, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB meninjau ulang kembali Keputusan Menteri PANRB No. 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK TA 2024 agar tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 meskipun tidak lagi aktif bekerja. 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara nasional paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU ASN diundangkan sebagaimana amanat Pasal 63 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 5. Komisi II DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah khususnya Pasal 146 agar peraturan 30% 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi PPPK.</p> <p>Menindaklanjuti Rapat Kerja, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PANRB dan BKN akan menyelenggarakan rapat konsinyering dalam rangka menyusun <i>road map</i> penataan tenaga honorer dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penyusunan RUU tentang Penyadapan	---	Sesuai dengan hasil rapat Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI pada tanggal 13 November 2023, bahwa Tim BKD akan merevisi kembali RUU tentang Penyadapan berdasarkan masukan Anggota Komisi III DPR RI.	RUU Usul Inisiatif Komisi III DPR RI.
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme (TPPT)	---	Tim Badan Keahlian DPR RI masih memperbaiki Rancangan Peraturan DPR RI tentang TPPT berdasarkan masukan Komisi III tanggal 31 Januari 2023.	Amanat Pasal 43J UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3.	Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang HAPER</i>)	---	Komisi III masih menunggu kesiapan Pemerintah dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.	Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 19 dan 28 Agustus 2024 serta berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham tanggal 4 September 2024, bahwa Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang
4.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan	---	Komisi III masih menunggu revisi draf RUU tentang Narkotika dari Pemerintah yang selanjutnya draf RUU tersebut akan disampaikan kepada masing-masing fraksi untuk dipelajari.	RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<i>RUU tentang Narkotika)</i>			Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat diusulkan ke Badan Legislasi DPR RI menjadi RUU operan (carry over) serta RUU tentang Hukum Perdata Internasional dapat ditetapkan menjadi RUU luncuran untuk dapat diusulkan dalam Prioritas Legislasi Nasional pada Masa Keanggotaan DPR RI Tahun 2024-2029.
5.	Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan <i>RUU tentang Mahkamah Konstitusi</i>)	Pengambilan Keputusan Tk I RUU tentang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Mei 2024.	Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopolkumham dan Menkumham dalam hal ini diwakilkan oleh Dirjen PP Kemenkumham dengan agenda Pengambilan Keputusan Tk. I pada tanggal 13 Mei 2024, dan memutuskan Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dilanjutkan pada Pembahasan Pengambilan Keputusan Tk. II dalam Rapat Paripurna. Saat ini Komisi III DPR RI masih menunggu penjadwalan Pembahasan Tk II RUU tentang Mahkamah di Rapat Paripurna.	Komisi III DPR RI menyampaikan hasil keputusan Rapat Kerja dengan Menkumham kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dengan nomor surat B/220-DW/KOM.III/MP.I/09/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Penyampaian RUU Operan dan Luncuran.
6.	Pembahasan RUU tentang Hukum Perdata Internasional		Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Agustus 2024 dan surat Pimpinan DPR RI Nomor T/430/PW.11.01/ tanggal 20 Agustus 2024 bahwa Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk membahas RUU tentang Hukum Perdata Internasional bersama dengan Pemerintah. Berdasarkan surat Presiden RI Nomor R-32/Pres/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perwakilan Pemerintah yang ditugaskan membahas RUU tentang Hukum Perdata Internasional bersama dengan DPR RI yaitu Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Luar Negeri dan Menteri Sosial.	
		Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 28 Agustus 2024.	Komisi III DPR RI menindaklanjuti penugasan tersebut dengan melakukan Rapat Intern Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Agustus 2024 guna membahas penugasan atas RUU dimaksud.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Jaksa Agung dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Jaksa Agung sesuai dengan Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor PRIN-102/A/JA/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024.	Raker dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 14.00 wib (setelah Rapat Paripurna), membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	<u>Kesimpulan :</u> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Jaksa Agung Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	
2.	1. Kepala BNPT 2. Sekjen DPD RI, dalam hal ini diwakilkan oleh Deputi Bidang Administrasi selaku Plh. Sekjen DPD RI, sesuai dengan Surat Pelaksana Harian Nomor	Raker dan RDP dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 16.00 wib, membahas membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	<u>Kesimpulan :</u> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Plh. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	KP.11.01/1196/DPDRI/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024.		RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	
3.	1. Kepala BNN 2. Plt. Sekjen MPR RI	Raker dan RDP dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 10.00 wib, membahas membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	<u>Kesimpulan :</u> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Narkotika Nasional dan Plt. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	
4.	1. Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2. Sekjen Mahkamah Konstitusi 3. Sekjen Komisi Yudisial	RDP dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 14.00 wib, membahas membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	<u>Kesimpulan :</u> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Plh. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	
5.	1. Kepala PPATK 2. Ketua Sementara KPK 3. Ketua LPSK 4. Ketua Komnas HAM	Raker dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 14.00 wib (setelah Rapat Paripurna), membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	Sehubungan adanya unjuk rasa di Gedung DPR RI, maka sesuai dengan arahan Pimpinan Komisi III DPR RI maka Rapat Kerja dibatalkan dan data mengenai LKPP tahun 2023 serta Hapsem BPK Tahun 2023 tetap diberikan kepada Komisi III DPR RI, begitu pula dengan data dari POLRI.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Menkumham	Raker dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.30 wib, membahas membahas LKPP Tahun 2023 serta Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023.	<p><u>Kesimpulan :</u> Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sementara KPK 2. Ketua LPSK 3. Ketua Komnas HAM, dan didampingi oleh Ketua Komnas Perempuan. 	Raker dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 pukul 14.00 wib (setelah Rapat Paripurna) membahas RKA K/L Tahun 2025 beserta dengan usulan program.	<p><u>Kesimpulan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1.237.441.326.000,- (<i>Satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp201.947.994.000,- (<i>Dua ratus satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp1.439.389.320.000,- (<i>Satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah</i>). 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp130.523.737.000,- (<i>Seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>) yang dialokasikan untuk Komnas HAM sebesar Rp99.573.230.000,- (<i>Sembilan puluh</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Komnas Perempuan sebesar Rp30.950.507.000,- (Tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh juta rupiah) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan Komnas HAM sebesar Rp37.172.594.000,- (Tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Komnas Perempuan sebesar Rp34.023.959.000,- (Tiga puluh empat miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp201.720.290.000,- (Dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).</i></p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp229.919.355.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp204.568.220.000,- (Dua ratus empat miliar lima ratus enam puluh delapan dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp434.487.575.000,- (Empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>4. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menkumham 2. Jaksa Agung 	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 pukul 10.00 wib, membahas RKA K/L Tahun 2025 beserta dengan usulan program.</p>	<p><u>Kesimpulan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp21.203.053.318.000,- (<i>Dua puluh satu triliun dua ratus tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah</i>). 2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Jaksa Agung Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp23.276.145.850.000,- (<i>Dua puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp4.597.232.791.000,- (<i>Empat triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>) sehingga menjadi Rp27.873.378.641.000,- (<i>Dua puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>). 3. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. 	
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2. Sekjen Mahkamah Konstitusi RI 3. Sekjen Komisi Yudisial RI 	<p>Raker dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 pukul 14.00 wib, membahas RKA K/L Tahun 2025 beserta dengan usulan program.</p>	<p><u>Kesimpulan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp12.152.558.495.000,- (<i>Dua belas triliun seratus</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)</i> dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp4.540.259.495.400,- (<i>Empat triliun lima ratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah</i>) sehingga menjadi Rp16.692.817.990.000,- (<i>Enam belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp611.477.078.000,- (<i>Enam ratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atas Pagu Anggaran tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp167.336.343.000,- (<i>Seratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah</i>) dan akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan sebesar Rp116.890.331.500,- (<i>Seratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>) sehingga menjadi Rp284.226.674.500,- (<i>Dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2025 kepada Badan</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Penanganan Sengketa Kementerian ATR BPN 2. Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung 3. Kajati Jawa Barat 4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Kemenkeu 5. Ketua Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) 	<p>Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 19 Agustus 2024, membahas tindakan penyerobotan tanah dalam penguasaan Yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang masih ada hak negara atas aset yang terletak di Jl. H. Juanda Nomor 93 Bandung.</p>	<p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kementerian Keuangan bersama Polri dan seluruh pihak terkait untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kekayaan/Aset Negara sesuai PMK Nomor 62/PMK.06/2020, dalam hal ini terhadap Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor S-6712/MK.2/2003 tertanggal 19 Desember 2003. 2. Komisi III DPR RI meminta Polri dalam hal ini Kapolda Jawa Barat dan jajarannya melakukan fungsi pengamanan sesuai ketentuan terhadap aset negara yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung yang kini dalam penguasaan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) dan seluruh penyelenggaraan kegiatan pendidikan di atasnya. 3. Komisi III DPR RI meminta Kajati Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat agar melakukan langkah-langkah untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap kekayaan negara, khususnya terhadap aset negara di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Komisi III DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa terkait dengan SHGB Nomor 30/Lebak Siliwangi di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. 5. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Barat dan jajarannya untuk tidak mendukung pengamanan eksekusi terhadap aset negara di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung. 6. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Barat untuk mencabut dan meniadakan police line, CCTV PT GMI, papan informasi PT GMI dan memasang kembali papan informasi dari Kementerian Keuangan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung. 	
2.	Ketua Komisi Yudisial RI	Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial RI dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 membahas Tindak lanjut kasus pidana vonis bebas yang diberikan Hakim PN Surabaya kepada Gregorius Ronald Tannur.	<p>Ketua Komisi Yudisial menyampaikan beberapa hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah ditemukan pelanggaran KEPPH, KY melaksanakan sidang Pleno pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan putusan para terlapor terbukti melanggar KEPPH dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. 2. Tingkat dan jenis sanksi yaitu menjatuhkan sanksi berat kepada para terlapor berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. 3. Rekomendasi KY berupa usul penjatuhan sanksi dan monitoring penjatuhan sanksi. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tanggapan Komisi III DPR RI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melihat hasil investigasi, tidak hanya sebatas pada pemberhentian karena ada preseden Hakim Agung pernah melakukan hal yang sama dan masuk dalam kualifikasi pemalsuan putusan. Rapat Permusyawaratan Hakim berbeda dengan putusan yang dibacakan majelis pada sidang. Jika benar maka rekomendasi Komisi Yudisial seharusnya masuk unsur pidana dan dikualifikasikan pemalsuan putusan. Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial untuk mencari unsur pidananya. Komisi III DPR RI akan menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung dengan mengikutsertakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk ikut mengawal di Majelis Kehormatan Hakim. Komisi III DPR RI akan merekomendasikan kepada Kapolri untuk berkoordinasi dengan Komisi Yudisial terkait dugaan pidana pemalsuan dokumen. 	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM Tahun 2024</p> <p>a. Hakim Agung Kamar Pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. Aviantara, S.H., M.Hum. 	<p>Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024.</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Agustus 2024 yang dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/431/PW.11.01/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 bahwa Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024.</p>	---

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>3) Abdul Azis, S.H., M.H.</p> <p>b. Hakim Agung Kamar Perdata</p> <p>1) Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.</p> <p>c. Hakm Agung Kamar Agama</p> <p>1) Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.</p> <p>d. Hakim Agung Kamar TUN</p> <p>1) Dr. Mustamar, S.H., M.H.</p>	<p>Rapat Pengambilan Nomor Urut dan Pembuatan Makalah Para Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.</p>	<p>Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi III DPR RI melaksanakan rangkaian uji kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024, yaitu pengambilan nomor urut uji kelayakan dilanjutkan dengan pembuatan makalah pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB.</p>	
	<p>e. Hakim Agung Kamar TUN (khusus Pajak)</p> <p>1) Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H.</p> <p>2) L.Y.Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.</p> <p>3) Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA.</p> <p>f. Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung</p> <p>1) Prof. Dr. Agus Budiarto, S.H., M.Hum.</p> <p>2) Bonifasius Nadya Arybowo, S.H., M.H.Kes.</p> <p>3) Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H.</p>	<p>Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024.</p>	<p>Pada saat akan melaksanakan uji kelayakan calon hakim agung tanggal 27 Agustus 2024, Komisi III DPR RI menemukan bahwa seleksi calon hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> HAM pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan persyaratan menjadi hakim agung, khususnya mengenai berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim.</p> <p>Dari 12 (dua belas) nama Calon Hakim yang diajukan oleh Komisi Yudisial terdapat 2 (dua) orang Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 <i>a quo</i>, yaitu mengenai pengalaman menjadi hakim paling sedikit 20 tahun.</p> <p>Pimpinan Komisi III DPR RI meminta pendapat masing-masing perwakilan Fraksi untuk memberikan pendapatnya mengenai tindak lanjut pembahasan uji kelayakan ini, dan sesuai dengan pendapat Fraksi-fraksi maka Komisi memutuskan bahwa permasalahan ini akan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dibawa dalam Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 28 Agustus 2024.	
		Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 28 Agustus 2024.	<p>Pada tanggal 28 Agustus 2024 Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Intern membahas Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 yang diajukan oleh Komisi Yudisial.</p> <p>Berdasarkan Pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing Kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memutuskan tidak memberikan persetujuan secara keseluruhan terhadap Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2024 yang diajukan Komisi Yudisial dengan nomor surat 1653/PIM/RH.01.07/07/2024 kepada DPR RI dan pembahasan uji kelayakan calon hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> pada Mahkamah Agung Tahun 2024 dibatalkan.</p> <p>Komisi III DPR RI melaporkan hasil Rapat Intern kepada Pimpinan DPR RI dengan surat Nomor B/209-DW/KOM.III/MP.I/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Penyampaian hasil Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Mahkamah Agung Tahun 2024.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Dihadiri oleh: a. <i>Embassy of the Republic of Indonesia, Wellington</i> b. <i>Department of Conservation (DoC)</i>	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 ke Selandia Baru (Fungsi Legislasi) pada 19 s.d 23 Agustus 2024.	Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Menteri Pertanian Menghadirkan: a. Kepala Badan Pangan Nasional; b. Direktur Utama Perum BULOG; c. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); d. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan (ID FOOD) beserta anak perusahaan.	Rapat Kerja dilaksanakan pada 26 Agustus 2024.	a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023; b. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2025; c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta d. Isu-isu aktual lainnya.	-
2	a. Plt. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 28 Agustus 2024.	a. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2025; dan	

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. Direktur Jenderal Hortikultura; e. Direktur Jenderal Perkebunan; f. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; h. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan i. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI 		<ul style="list-style-type: none"> b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	
3	<p>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menghadirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; b. Direktur Utama Perum Perhutani; c. Direktur Utama PT Inhutani I; dan d. Direktur Utama PT Inhutani V. 	Rapat Kerja dilaksanakan pada 2 September 2024.	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023; b. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025; c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta d. Isu-isu aktual lainnya 	
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; d. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; e. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan; f. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 2 September 2024.	<ul style="list-style-type: none"> a. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024; dan b. Usulan program – program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. 	

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	g. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; h. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3; i. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; j. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; k. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan m. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
5	Menteri Kelautan dan Perikanan Menghadirkan: a. Kepala Badan Karantina Indonesia; b. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/<i> Holding Pangan/ID FOOD;</i> c. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero); d. Direktur Utama PT Garam (Persero).	Rapat Kerja dilaksanakan pada 3 September 2024	a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023; b. RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta d. Isu-isu aktual lainnya	

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6	a. Sekertaris Jenderal; b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; d. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; e. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; f. Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; g. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 3 September 2024.	a. RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; b. Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	
7	Kepala Badan Pangan Nasional Menghadirkan: a. Direktur Utama Perum Bulog; b. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID FOOD beserta anak perusahaan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan 4 September 2024.	a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023; b. RKA K/L Tahun 2025; c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta d. Isu-isu aktual lainnya.	
8	Kepala Badan Karantina Indonesia	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 4 September 2024.	a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023; b. RKA K/L Tahun 2025; c. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; serta d. Isu-isu aktual lainnya.	

NO	PIHAK / WAKTU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9	<p>a. Menteri Pertanian RI; b. Menteri Kelautan dan Perikanan RI; dan c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.</p> <p>Menghadirkan:</p> <p>a. Kepala Badan Pangan Nasional; b. Kepala Badan Karantina Indonesia; c. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; d. Direktur Utama Perum Bulog; e. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/<i> Holding Pangan/ID FOOD</i> beserta anak perusahaan; f. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan; g. Direktur Utama Perum Perhutani beserta anak perusahaan;</p>	Rapat Kerja dilaksanakan pada 6 September 2024.	<p>a. RKA K/L Tahun 2025; b. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah b. Pemerintah Kabupaten Klaten; c. Kementerian Pertanian; d. Kementerian Kelautan dan Perikanan; e. Badan Pangan Nasional; f. Perum Bulog; g. PT Pupuk Indonesia;</p>	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan 22 s.d. 24 Agustus 2024.	<p>1. Meninjau dan Diskusi mengenai Peningkatan Produksi Padi di Kec. Karangdowo, Kabupaten Klaten; 2. Meninjau dan Diskusi mengenai Kawasan Budi Daya Ikan Air Tawar di Botorejo, Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</p>	

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> h. ID Food; i. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah; j. Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah; k. Dinas terkait di Kabupaten Klaten; l. Penyuluh Pertanian; m. Distributor dan Kios Kabupaten Klaten; n. Pelaku Usaha; dan o. Petani/Gapoktan/Poktan. 			
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Provinsi Bali; b. Pemerintah Kabupaten Buleleng; c. Pemerintah Kabupaten Tabanan; d. Pemerintah Kota Denpasar; e. Kementerian Pertanian; f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; g. Kementerian Kelautan dan Perikanan; h. Badan Karantina Indonesia; i. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusra; j. Perum Bulog; k. PT Pupuk Indonesia; l. ID Food; m. Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI). n. Distributor, Kios, dan Penerima Manfaat; dan o. Penyuluh Pertanian. 	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada 22 s.d. 24 Agustus 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Lapangan dan Diskusi Pengelolaan Agroforestry dan Wisata Alam di Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Hutan Desa Wanagiri, Buleleng. b. Peninjauan dan Diskusi mengenai Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk dalam Upaya Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Pasokan Pangan di Gudang PT BGR Logistisk Indonesia Tabanan. c. Diskusi dan Peninjauan ke Pengolahan Ikan Tuna dalam rangka Ketahanan Pangan, Pengembangan Industri Perikanan di Indonesia Berbasis Ekspor di Pengolahan Ikan Tuna Bandar Nelayan, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. 	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi	Raker dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024.	1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2023;	
2.	Kementerian PUPR	Raker dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024.	1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2023	
3.	Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi	Raker dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024.	Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian Desa PDTT, dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.	
4.	BMKG Dan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan/ BASARNAS	RDP dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024.	1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024; 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2023; 3. Membahas RKA K/L TA. 2025 BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Kementerian PUPR	Raker dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024.	Membahas RKA K/L TA. 2025 BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.	
6.	Kementerian PUPR	Raker dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Evaluasi APBN TA 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024; 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2023; 3. Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025 	
7.	Kementerian PUPR <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Kepala BPSDM; 4. Kepala BPIW. 	RDP dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025;	
8.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekjen; 2. Inspektur Jenderal; 3. Kepala BPSDM-P; 4. Kepala BKT . 	RDP dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025	
9.	Eselon I Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi	RDP dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.	
10.	Kementerian PUPR <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Bina Marga (turut menghadirkan Kabalai Pelaksanaan Jalan Nasional Seluruh Indonesia) 	RDP dilaksanakan pada Senin, 3 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
11.	KEMENTERIAN PUPR 1. Dirjen Perumahan (menghadirkan Kabalai Pelaksana Penyediaan Perumahan Seluruh Indonesia) 2. Dirjen Sumber Daya Air (menghadirkan Kabalai Wilayah Sungai Seluruh Indonesia)	RDP dilaksanakan pada 3 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.	
12.	KEMENTERIAN PUPR 1. Dirjen Bina Konstruksi (turut menghadirkan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Seluruh Indonesia (BP2JK)) 2. Dirjen Cipta Karya (menghadirkan Kabalai Prasarana Permukiman Wilayah Seluruh Indonesia)	RDP dilaksanakan pada 4 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.	
13.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Dirjen Perkeretaapian (turut menghadirkan Kabalai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia) 2. Dirjen Perhubungan Darat (menghadirkan Kepala BPTD Seluruh Indonesia) 3. Kepala BPTJ.	RDP dilaksanakan pada 4 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025	
14.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Dirjen Perhubungan Laut (menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan)	RDP dilaksanakan pada 4 September 2024.	Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Dirjen Perhubungan Udara (menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara)			

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kota Malang	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024.	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kota Malang Dalam Penataan Mitigasi di Titik Rawan Bencana	
2.	Bupati Kapuas Hulu	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024.	Aspirasi Masyarakat Terkait Dukungan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa serta Usulan-Usulan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	
3.	1. Kementerian PUPR - (Ditjen Cipta Karya) 2. Kementerian Perhubungan - (Ditjen Hubdat) 3. BNPP/ BASARNAS 4. Kemendes PDTT	Kunker di laksanakan pada tanggal 23 – 25 Agustus 2024.	Kunjungan Kerja ke: 1. Kabupaten Sumedang , Provinsi Jawa Barat, Meninjau Jembatan Timbang Tomo. 2. Desa Sirnajaya, Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau BUM Desa Sinar Makmur. 3. Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam rangka meninjau Pembangunan Pasar Baros.	
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Merangin	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024.	Audiensi dengan Kepala PMD, Apdesi, Papdesi, Kepala Desa dan BPD se Kabupaten Merangin.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kementerian BUMN RI	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025 (Pagu Anggaran). 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024. 3. Pembahasan permasalahan PT Indonesia Farma, Tbk, (Indofarma), dan 4. Lain-lain. 	
2	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025 (Pagu Anggaran). 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024, dan 3. Lain-lain. 	
3	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025 (Pagu Anggaran). 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024, dan 3. Lain-lain. 	
4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025 (Pagu Anggaran). 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024, dan 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Batam dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.	3. Lain-lain.	
5	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.	1. Pembahasan RKA KL TA. 2025 (Pagu Anggaran). 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024, dan 3. Lain-lain.	
6	Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024.	Pembahasan mengenai: 1. RKA KL TA. 2025. (Pagu Anggaran) 2. Pelaksanaan Realisasi anggaran dan investasi s.d Triwulan II TA. 2024. 3. Rencana Investasi Tahun 2025-2029, dan 4. Lain-lain	
7	Kementerian Koperasi dan UKM RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024.	Pembahasan mengenai: 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025. (Pagu Anggaran) 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024. dan 3. Lain-lain	
8	Kementerian Perdagangan RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.	Pembahasan mengenai: 1. Pembahasan RKA KL TA. 2025. (Pagu Anggaran) 2. Pelaksanaan anggaran s.d Triwulan II TA. 2024. dan 3. Lain-lain	
9	Kementerian Investasi/Kepala BKPM RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10	Kementerian BUMN RI	Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
11	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
12	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
14	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
15	Kementerian Koperasi dan UKM RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	
16	Kementerian Perdagangan RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024.	1. Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, dan 2. Lain-lain.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia	RDPU Komisi VI DPR RI dengan Ketua Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024.	Menerima Audiensi dari Perkumpulan Pabrik Mononatrium Glutamat dan Asam Glutamat Indonesia.	
2		Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024.	Laporan Panja-Panja Pengawasan Komisi VI DPR RI yang sudah selesai dan belum selesai.	
3	PT Pertamina Hulu Energi	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi beserta Sub <i> Holding</i> dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024.	Pembahasan mengenai: 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023. 2. Rencana aksi Korporasi Tahun 2025. 3. Lain-lain.	
4	PT. Indofarma Tbk.	Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Indofarma Tbk. dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 September 2024.	Dalam rangka peninjauan kinerja korporasi PT. Indofarma Tbk.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan	Rapat Timus dan Timsin RUU EBET dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 pukul 10.00 WIB.	Perumusan Pembahasan Panja RUU EBET dilanjutkan Sinkronisasi.	
2.	RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan	Rapat Panja RUU EBET dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 pukul 14.00 WIB.	Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi di dalam Panja RUU EBET.	
3.	RPP KEN	Raker dengan Menteri ESDM RI (Selaku Ketua harian DEN) dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 pukul 10.00 WIB.	1. Pengantar Pimpinan 2. Pembacaan Naskah RPP KEN 3. Pendapat Akhir Mini Fraksi (Poksi)	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala BIG dan Kepala BAPETEN	RDP dalam rangka Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA. 2023) dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIB.	1. Komisi VII DPR RI dapat memahami laporan keuangan Kepala BIG dan Plt. Kepala BAPETEN pada APBN TA. 2023 dan memberikan apresiasi kepada Kepala BIG dan Plt. Kepala BAPETEN atas capaian kinerja keuangan Tahun 2023 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Komisi VII DPR RI mendesak agar Kepala BIG dan Plt. Kepala BAPETEN menindaklanjuti seluruh	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			temuan laporan keuangan Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI. 3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BIG dan Plt. Kepala BAPETEN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI, termasuk hasil tindak lanjut atas temuan BPK RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 28 Agustus 2024.	
2.	Kepala BRIN	RDP dalam rangka Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA. 2023) dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB.	1. Komisi VII DPR RI dapat memahami laporan keuangan BRIN pada APBN TA. 2023 dan memberikan apresiasi kepada Kepala BRIN atas capaian kinerja keuangan Tahun 2023 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan riset dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. 3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BRIN untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI terkait pemanfaatan aset-aset Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek) BRIN kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 28 Agustus 2024. 4. Komisi VII DPR RI mendesak agar Kepala BRIN untuk menindaklanjuti seluruh temuan laporan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			keuangan Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI. 5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BRIN untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI, termasuk hasil tindak lanjut atas temuan BPK RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 28 Agustus 2024.	
3.	Menteri Perindustrian RI	Rapat kerja dalam rangka Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA. 2023) dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.	1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Perindustrian RI atas capaian kinerja keuangan Tahun 2023 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 2. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Perindustrian RI yang telah menindaklanjuti seluruh temuan sesuai rekomendasi BPK RI Tahun 2023 secara tuntas. 3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 2 September 2024.	
4.	Menteri ESDM RI	Rapat kerja dalam rangka Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2023 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA. 2023) dilaksanakan pada	1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI atas capaian kinerja keuangan Tahun 2023 dan mendorong Kementerian ESDM RI untuk segera menyelesaikan tindak lanjut seluruh	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		tanggal 26 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB.	temuan sesuai rekomendasi BPK RI Tahun 2023 secara tuntas. 2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 2 September 2024.	
5.	Menteri ESDM RI	Rapat kerja dengan agenda: 1. Pembahasan Asumsi Dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 dilanjutkan penetapan. 2. Pengantar RKA-K/L TA. 2025.	Komisi VII DPR RI memahami penjelasan Menteri ESDM RI terkait Pagu Anggaran Kementerian ESDM RI Tahun 2025 sebesar Rp. 10.884.702.389.000 (Sepuluh Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang didapat dari rupiah murni dan PNBPN sektor minerba dan migas serta akan dialami dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM RI.	
6.	Kepala BAPETEN dan Kepala BIG	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada Tanggal 3 September 2024 Pukul 13.00 WIB, dengan agenda: 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2024. 2. Pembahasan detail RKA-KL TA 2025 dilanjutkan penetapan.	Rapat tertutup	
7.	Kepala BRIN	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada	Rapat tertutup	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Tanggal 3 September 2024 Pukul 16.00 WIB, dengan agenda: 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2024 2. Pembahasan detail RKA-KL TA 2025 dilanjutkan penetapan		
8.	Menteri Perindustrian RI	Rapat kerja dilaksanakan pada Tanggal 4 September 2024 Pukul 13.00 WIB, dengan agenda: 1. Pengantar RKA-K/L TA. 2025. 2. Lain-lain.	Rapat tertutup.	
9.	Eselon I Kementerian ESDM RI (Sekjen, Irjen, Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Kepala BPSDM, Kepala Bdan Geologi, Sekjen DEN, dan Kepala BPMA)	RDP Dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024, Pukul 13.00 WIB, dengan agenda: 1. Progres pelaksanaan kegiatan TA 2024. 2. Pembahasan detail RKA-K/L TA 2025.	Rapat tertutup.	
10.	Menteri ESDM RI	Rapat kerja dilaksanakan pada Tanggal 5 September 2024 Pukul 19.00 WIB dalam rangka Penetapan RKA-K/L.	Rapat tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Profesional staf <i>US Congres</i>	Rapat Audiensi diskusi sektor mineral dan Energi dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.		
2.	Rapat Pimpinan	Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.	1. Menyusun Jadwal Rapat Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025; 2. Lain-lain.	
3.	Rapat Intern	Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB.	1. Menyusun Jadwal Rapat Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025; 2. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA dengan agenda “Pembahasan Laporan Keuangan APBN TA 2023, Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 dan Program Perlindungan Anak, serta Isu-isu Aktual” tanggal 2 September 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp284.979.106.172,- (<i>Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah</i>) atau 97,82% dari Pagu Anggaran sebesar Rp291.326.942.000,- (<i>Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah</i>) 2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik PPA tahun 2023 sebesar Rp99.178.329.205,- (<i>Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah</i>) atau 81,47% dari Alokasi DAK NonFisik PPA Tahun 2023 sebesar Rp132.000.000.000,- (<i>Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Rupiah</i>) yang diberikan kepada 275 daerah (33 Provinsi dan 242 Kab/Kota). 3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp300.654.181.000,- (<i>Tiga Ratus Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah</i>)</p>	
2.	Kementerian Agama RI	<p>Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dengan agenda “Pembahasan RKA Kementerian Agama RI Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual” tanggal 2 September 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.018.712.137.000,- (<i>Tujuh Puluh Delapan Triliun Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah</i>) 2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut atas usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.542.505.686.000,- (<i>Tujuh Belas Triliun Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah</i>) 	-
3.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	<p>Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB dengan agenda “Pembahasan Laporan Keuangan APBN 2023, Pembahasan RKA BNPB Tahun 2025, dan Isu-isu Aktual” tanggal 3 September 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Laporan Keuangan BNPB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.435.168.423.433,- (<i>Lima Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah</i>) atau 99,16% dari Pagu Anggaran sebesar Rp5.481.143.903.000,- (<i>Lima Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah</i>) 2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Rencana Kerja dan Anggaran BNPB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp927.574.663.000,- (<i>Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh</i> 	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)</i></p> <p>3. Komisi VIII menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.887.896.280.000,- (<i>Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>)</p>	
4.	Kementerian Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda “Pembahasan RKA Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 dan Isu-isu Aktual” tanggal 3 September 2024.	<p>1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77.188.005.512.000,- (<i>Tujuh Puluh Tujuh Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah</i>)</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.613.495.798.950,- (<i>Sembilan Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah</i>)</p>	-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI	Rapat Dengar Pendapat dalam rangka Evaluasi Kinerja Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Lingkungan Kementerian Agama tanggal 29 Agustus 2024.	1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan mengenai kinerja program Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan 4 (empat) kegiatan prioritas: kemandirian pesantren, penyaluran dana BOS/PIP, Bantuan Operasional (BOP) dan Sapras, serta layanan Direktorat	-

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (DitPDPontren), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan melalui program Pesantrenpreneur, BUMPes dan Santripreneur, <i>Pesantren Community Economic Hub</i>, dan replikasi model Kemandirian Pesantren di 1500 Pesantren. b. Kouta BOS Pondok Pesantren tahun 2024 sebesar Rp340.500.520.000 (<i>Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah</i>) dan kuota bantuan PIP sebesar Rp125.539.900.000,- (<i>Seratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah</i>) c. Target Penerima Bantuan Operasional (BOP) dan Saprass sebanyak 1.500 pesantren dengan anggaran sebesar Rp160.500.000.000,- (<i>Seratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah</i>) dan anggaran manajemen sebesar Rp37.500.000.000,- (<i>Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah</i>) d. Pengembangan layanan pesantren melalui layanan Telepontren. <p>2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan pengalokasian Dana Abadi Pesantren (DAP) yang berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.</p>	

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Majelis Masyayikh	Evaluasi Kinerja Majelis Masyayikh tanggal 29 Agustus 2024.	1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan mengenai kinerja Majelis Masyayikh dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran bantuan operasional dari pagu anggaran Kementerian Agama RI sebesar Rp18.500.000.000, (<i>Delapan Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah</i>) dengan capaian kuantitatif tercapainya beberapa hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Sebanyak 20 Regulasi Standar Mutu Pendidikan Pesantren: SKL, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Kelembagaan. b. Sebanyak 784 Surat ke 24 Kementerian, 34 Gubernur, 34 DPRD Provinsi, 346 Bupati/Walikota, dan 346 DPRD Kabupaten/Kota. c. Sebanyak 17 Keputusan Majelis Masyayikh (internal dan menjadi Keputusan Menteri Agama) yang ditetapkan. d. Sebanyak 13 Ma'had Aly yang diwawancara dan didampingi untuk mendapatkan rekomendasi pendirian. e. Sebanyak 3.179 Pondok Pesantren dan <i>stakeholder</i> lain yang terlibat dan terjangkau oleh Majelis Masyayikh, baik melalui sosialisasi, penyusunan dokumen, dan pertemuan ilmiah. 	-

NO	KEGIATAN	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>f. Sebanyak 520 Pertemuan, diskusi, rapat yang dilakukan Majelis Masyayikh, baik secara daring maupun luring.</p> <p>g. Sebanyak 68 Peraturan Daerah yang dikaji dari 11 Provinsi, 51 Kabupaten, 6 kabupaten/kota. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendorong Majelis Masyayikh untuk meningkatkan kinerjanya guna menyusun dan merumuskan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Majelis Masyayikh di antaranya:</p> <p>a. Pemisahan Dana Abadi Pesantren dengan Dana Abadi Pendidikan sesuai regulasi, sehingga peruntukannya hanya untuk pendidikan pesantren.</p> <p>b. Keterlibatan Majelis Masyayikh dalam memberikan rekomendasi & perencanaan, dan pengambilan keputusan Dana Abadi Pesantren.</p> <p>c. Menyusun roadmap pemanfaatan Dana Abadi Pesantren (DAP).</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI	Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 pada Selasa, 27 Agustus 2024.	Tertutup.	
2.	Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 pada Selasa, 27 Agustus 2024.	Tertutup.	
3.	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 pada Rabu, 28 Agustus 2024.	Tertutup.	
4.	Kepala BKKBN RI	Rapat Dengar Pendapat dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dilaksanakan pada Rabu, 28 Agustus 2024.	Tertutup.	
5.	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 pada Kamis, 29 Agustus 2024.	Tertutup.	
6.	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 pada Senin, 2 September 2024.	Tertutup.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 2 September 2024 dengan agenda: 1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	Tertutup.	
8.	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Rapat Dengar Pendapat pada Senin, 2 September 2024 dengan agenda: 1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	Tertutup.	
9.	Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	Rapat Dengar Pendapat pada Selasa, 3 September 2024 dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun 2025	Tertutup.	
10.	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja pada Selasa, 3 September 2024 dengan agenda: 1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.	Tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI	Pembahasan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Senin, 26 Agustus 2024.	Tertutup	
2.	Rapat Internal Komisi IX DPR RI	Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Senin, 26 Agustus 2024.	Tertutup	
3.	DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)	Audiensi meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mencabut PP No. 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan mencabut UU No. 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja/ <i>Omnibus Law</i> pada Kamis, 29 Agustus 2024.	Komisi IX DPR RI mengapresiasi dan menerima masukan dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan KSPSI, masukan tersebut akan menjadi bahan Komisi IX DPR RI pada saat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja terkait.	
4.	Menteri Kesehatan RI	Rapat kerja dilaksanakan pada Kamis 29 Agustus 2024. 1. Penjelasan terkait perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. 2. Membahas isu terkini khususnya: a. peningkatan kasus cuci darah pada anak;	1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI menciptakan harmonisasi kebijakan antara Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ('PP 28/2024') agar implementasinya dapat berjalan efektif, melalui: a. meningkatkan komunikasi publik dalam mensosialisasikan PP 28/2024;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. status pandemik dan kondisi terkini wabah <i>Mpox</i> ; c. pengawasan proses pendidikan kedokteran di Indonesia.	b. memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna (<i>meaningful participation</i>) dalam penyusunan seluruh peraturan pelaksana dari Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan c. segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP 28/2024, termasuk di dalamnya peraturan yang memberikan penjelasan terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e PP 28/2024. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mengambil langkah strategis dalam mengatasi isu – isu aktual dalam kesehatan, antara lain: a. mengeluarkan kebijakan pengetatan konsumsi makanan dan minuman berpemanis; b. memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan bagi anak – anak yang mengalami gagal ginjal, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan c. memastikan rencana mitigasi yang jelas terkait penyakit mpox, dengan merujuk pada pedoman yang telah ada selama pandemi COVID-19 serta mensosialisasikannya kepada masyarakat. 3. Komisi IX DPR RI menekankan pentingnya penjelasan yang rinci mengenai Rencana Induk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai acuan utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melibatkan pemerintah daerah guna sinkronisasi antara program pusat dan daerah demi memastikan keberlanjutan pelaksanaan transformasi kesehatan.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan spesialis, sesuai dengan konstruksi yang ada di Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang sudah memiliki instrumen kuat, termasuk dalam hal mengatasi permasalahan perundangan terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).</p>	
5.	IAI, PERSI, APKESMI, GP Farmasi, IPMG	Rapat Panja mengenai Pengawasan Terhadap Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Obat pada Rabu, 4 September 2024 dengan agenda Masukan untuk perbaikan sistem keamanan dan mutu obat dalam pelayanan kesehatan.	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat telah mendapat Penjelasan dari Ketua Umum IAI, Wakil Ketua 2 PERSI, Ketua Umum APKESMI, Direktur Eksekutif GP Farmasi, Direktur Eksekutif IPMG, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat.dalam menyusun laporan akhir panja.	
6.	IDAI, ARSADA, APKESMI, PERSAGI	Rapat Panja mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dilaksanakan pada Rabu, 4 September 2024 dengan agenda	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> telah mendapat Penjelasan dari ketua umum IDAI, ketua umum ARSADA, ketua umum APKESMI, ketua umum	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Peran Organisasi Profesi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	PERSAGI selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI Mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam menyusun laporan akhir panja.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	-	Komisi X sedang menunggu terbitnya Surat Presiden RI untuk membahas RUU tentang Kepariwisata.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menparekraf RI/Kepala Baparekraf RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 29 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.	<p>Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2025, dengan catatan mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, program dan kegiatan difokuskan sesuai RKP Tahun 2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025—2029 dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif • Program-program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada peningkatan kualitas SDM Parekraf dan berdampak langsung kepada pelaku parekraf serta masyarakat harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan. • Kemenparekraf/Baparekraf RI meningkatkan kolaborasi dengan pihak lokal (pengusaha, akademisi, SDM dan pelaku Parekraf, pemda) untuk pengembangan potensi parekraf di daerah. • Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan selama tahun 2020—2024, termasuk 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>destinasi prioritas dan superprioritas, untuk dilakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan program di tahun 2025.</p>	
2.	Mendikbudristek RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan tanggal 29 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB.	<p>Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahannya sebagaimana tercantum pada angka II.1 dan II.2 dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendesak Kemendikbudristek RI untuk membangun pola koordinasi yang transparan mengenai pembangunan sarpras pendidikan oleh Kementerian PUPR RI, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses untuk mengusulkannya dan Kemendikbudristek memiliki peran yang signifikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengoptimalkan implementasi DAK dengan lebih terbuka dalam hal akses dan pemanfaatannya untuk pembangunan pendidikan di daerah. • Mendesak Kemendikbudristek RI menyajikan data program, target dan anggaran sesuai RKP TA 2025 bidang pendidikan. • Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kementerian PUPR RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI untuk mendapatkan hasil audit terkait pelaksanaan sarana prasarana pendidikan untuk memastikan tepat sasaran. • Mendorong kemendikbudristek RI mengoptimalkan penggunaan anggaran PPG untuk meningkatkan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi. 	
3.	Plt. Kepala Perpunas RI	RDP Komisi X DPR RI tanggal 29 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Perpunas RI menyampaikan bahwa berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2025, pagu anggaran Perpunas RI sebesar Rp721.684.480.000,00 (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpusnas RI menyampaikan Pagu Anggaran DAK Fisik Sub-Bidang Perpustakaan TA 2025 adalah sebesar Rp232.478.000.000,00 (<i>Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah</i>) • Terhadap penjelasan Perpusnas RI terkait pagu anggaran sebesar Rp721.684.480.000, (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>) Komisi X DPR RI akan melakukan pendalaman melalui RDP/Konsinyasi dalam waktu dekat, termasuk pendalaman terkait DAK Fisik dan Non Fisik. 	
4.	Pejabat Eselon I Kemenparekraf/Baparekr af RI	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI tanggal 31 Agustus–1 September 2024.	Rapat tertutup.	
5.	Pejabat Eselon I Kemendikbudristek RI	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI tanggal 2—3 September 2024.	Rapat tertutup.	
6.	Pejabat Eselon I Perpusnas RI	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI tanggal 4 September 2024.	Rapat tertutup.	
7.	Menpora RI	Raker Komisi X DPR RI tanggal 5 September 2024, pukul 10.00 WIB	<p>Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman terhadap pagu anggaran Kemenpora RI pada RAPBN TA 2025, dengan catatan mendorong Kemenpora RI agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat sinergi program dengan Kemendikbudristek RI, khususnya terkait indikator kualitas pemuda dalam peningkatan presentase pemuda yang memiliki ijazah minimal SMA/setara. • meningkatkan sosialisasi Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) untuk mendapatkan dan memperkuat substansi dalam pengaturannya. 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • mengintegrasikan dan mengolaborasikan potensi kreatif kepemudaan dalam program-program bidang kepemudaan dan keolahragaan. • melakukan optimalisasi pembibitan atlet muda yang berasal dari daerah dengan tidak hanya mengandalkan pada Cabor favorit/populer. • Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dapat diimplementasikan secara optimal dengan mengalokasikan anggarannya secara memadai pada tahun 2025. • memiliki dan menjalankan secara konsisten peta pengelolaan (<i>maintenance</i>) gedung dan fasilitas pertandingan <i>pascaeven</i> (pasca penyelenggaraan PON), sehingga tetap dapat dimanfaatkan secara maksimal. <p>Terhadap usulan tambahan sebagaimana Surat Kemenpora RI Nomor B-PR.03.01/6.10.31/MENPORA/VI/2024 sebesar Rp2.967.000.000.000,00 (<i>Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah</i>) untuk kegiatan tertentu di masing-masing Satker, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemenpora untuk menyampaikan penjelasan secara rinci dan komprehensif pada setiap program dan kegiatannya dalam RDP pendalaman, sehingga dapat menjadi argumentasi untuk peningkatan anggaran.</p>	
8.	Pejabat Eselon I Kemenpora RI	RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI Tanggal 5 September 2024, pukul 12.00 WIB.	Rapat tertutup.	
9.	Mendikbudristek RI	Raker Komisi X DPR RI tanggal 6 September 2024, pukul 09.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemendikbudristek RI RAPBN TA 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000,00 (<i>Delapan Puluh Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahan Kemendikbudristek RI sebesar Rp26.439.413.599.000,00 (<i>Dua Puluh Enam Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar</i> 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI akan menyampaikan pagu sementara Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp83.187.821.056.000,00 (<i>Delapan Puluh Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahan sebesar Rp26.439.413.599.000,00 (<i>Dua Puluh Enam Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah</i>) • sebagaimana tercantum pada angka II.1. dan II.2., kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian. • Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemendikbudristek RI untuk menjadikan pandangan, masukan, dan catatan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan pagu indikatif dan pagu sementara RAPBN TA 2025, sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2025 pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan rapat kerja hari ini tanggal 6 September 2024, menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2025. 	
10.	Menparekraf/Kepala Baparekraf RI	Raker Komisi X DPR RI dengan tanggal 6 September 2024, pukul 13.30 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp1.768.347.951.000,- (<i>Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah</i>) serta usulan tambahan sebesar Rp3.052.364.852.000,00 (<i>Tiga Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah</i>) • Komisi X DPR RI akan menyampaikan Pagu Sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2025 sebesar 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rp1.768.347.951.000,00 (<i>Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahan sebesar Rp3.052.364.852.000,00 (<i>Tiga Triliun Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian. • Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2025, mulai Raker 5 Juni 2024 sampai Raker hari ini sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2025. 	
11.	Plt. Kepala Perpusnas RI	RDP Komisi X DPR RI tanggal 6 September 2024, pukul 15.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Perpusnas RI RAPBN TA 2025 sebesar Rp721.684.480.000,00 (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahan Perpusnas RI sebesar Rp375.072.026.000,00 (<i>Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah</i>) untuk penguatan peningkatan budaya literasi dan peningkatan layanan internal. • Komisi X DPR RI akan menyampaikan pagu sementara Perpusnas RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp721.684.480.000,00 (<i>Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah</i>) usulan tambahan sebesar Rp375.072.026.000,00 (<i>Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah</i>) sebagaimana kesimpulan/keputusan nomor II.1 dan II.2 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan penyesuaian. • Komisi X DPR RI menekankan kepada Perpusnas RI untuk 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menjadikan pandangan, masukan, dan catatan anggota Komisi X DPR RI (termasuk penyediaan motor perpustakaan keliling dan pojok baca digital untuk memperluas akses bahan bacaan), dalam rangkaian pembahasan pagu indikatif dan pagu sementara RAPBN TA 2025, sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2025 pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan Rapat Dengar Pendapat hari ini, menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Perpusnas RI pada RAPBN TA 2025.	
12.	Menpora RI	Raker Komisi X DPR RI tanggal 6 September 2024, pukul 16.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemenpora RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp1.830.383.940.000,- (<i>Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah</i>) beserta usulan tambahan Kemenpora RI pada Pagu Sementara RAPBN TA 2025 sebesar Rp2.967.000.000.000,00. (<i>Dua Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah</i>) • Komisi X DPR RI akan menyampaikan pagu sementara Kemenpora RI pada RAPBN TA 2025 sebesar Rp1.830.383.940.000,00 (<i>Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah</i>) sebagaimana kesimpulan/keputusan nomor II.1. dan II.2. tersebut, kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dilakukan pembahasan dan penyesuaian. • Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemenpora RI untuk menjadikan pandangan, masukan, dan catatan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan pagu indikatif dan pagu sementara RAPBN TA 2025, sejak pembicaraan pendahuluan pada 5 Juni 2024 sampai dengan rapat kerja hari ini 6 September 2024, sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora RI pada RAPBN TA 2025. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Komisi X DPR RI	Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.	Tertutup.	
2.	Rapat Internal Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI	Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB.	Tertutup.	
3.	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI (Pembiayaan Pendidikan) Penyampaian aspirasi terkait: 1. Hasil pengamatan dan rekomendasi pemenuhan program wajib belajar. 2. Perkembangan <i>Judicial Review</i> atas norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tentang Sisdiknas.	ICW merekomendasikan, evaluasi dan pembenahan penganggaran pendidikan, pembenahan mekanisme pengawasan DPR RI/DPRD, serta meningkatkan pengelolaan anggaran dan pengadaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. ICW menyampaikan bahwa kebijakan PPDB adalah dampak pembiayaan pendidikan yang belum berkeadilan. Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Perlu melakukan penghitungan ulang secara proporsional terhadap pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada alokasi TKDD, Kementerian/Lembaga lainnya, dan Anggaran Pendidikan pada Belanja Non-K/L agar sesuai amanat konstitusi (20% APBN) dalam upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan (penuntasan wajib belajar 12 tahun). • Mendukung kesetaraan pelibatan lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat/swasta dalam program-program Kemendikbudristek. • Mendukung upaya masyarakat untuk 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melakukan pengujian perundang-undangan (<i>Judicial Review</i>) pasal-pasal UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas terkait pembiayaan pendidikan agar sesuai dengan konstitusi.	
4.	Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI, Dirjen Paud Dikdasmen, Plt. Dirjen Pendidikan Vokasi, dan Kepala Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek RI	Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB. RDP Komisi X DPR RI (Pembiayaan Pendidikan) dengan Agenda: Membahas regulasi dan implementasi pembiayaan pendidikan (beasiswa dll), serta Masukan terhadap pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.	Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menuntaskan wajib belajar, pemerintah perlu mengkaji kerja sama/afiliasi antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, agar siswa usia belajar dapat tertampung di satuan pendidikan yang ada, baik negeri maupun swasta. • Mendorong Kemendikbudristek RI untuk bekerja sama secara intens dengan LPDP sebagai lembaga pengelola anggaran pendidikan, untuk mendukung penggunaan anggaran pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai amanat UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. • Mendorong Kemendikbudristek RI untuk membuat simulasi proporsi anggaran pendidikan dalam postur anggaran pendidikan di APBN dengan APBD, yang diindikasikan rata-rata 70% merupakan distribusi dari APBN. 	
5.	Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FPHPGRI)	Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI dengan Agenda: Penyampaian aspirasi terkait berbagai masalah di berbagai daerah tentang	Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong pemerintah 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		honoror.	(Kemendikbudristek RI, Kemenpan-RB, Kemenkeu RI, Kemendagri RI) untuk melakukan penyelesaian permasalahan guru honoror tafrun 2024. <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan Guru Honoror sesuai peraturan perundang-undangan. • Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI menginisiasi rapat dengan K/L terkait bersama Komisi X DPR RI, untuk membahas penyelesaian permasalahan guru honoror. 	
6.	Kunjungan Spesifik	Tanggal 26—28 Agustus 2024 Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Provinsi Bali.	Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Kemendikbudristek RI memberikan pendampingan pada Dinas Pendidikan Provinsi dalam menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang digunakan sebagai pedoman penyusunan juklak/juknis PPDB yang disesuaikan dengan kondisi daerah terutama dalam penetapan zonasi dan jalur lainnya. • Perumusan kebijakan PPDB yang akan dikeluarkan oleh Pemda hendaknya melibatkan dewan pendidikan daerah dan asosiasi komite sekolah sehingga substansi yang akan diatur 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sudah mewakili kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Kemendikbudristek RI dan Pemda terus melakukan evaluasi dan monitoring berkala agar setiap permasalahan PPDB yang muncul segera dapat dicarikan jalan keluar tanpa merugikan peserta didik untuk mendapatkan akses pendidikan. • Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengoptimalkan implementasi DAK Fisik untuk mendukung pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru dan fasilitas penunjangnya di satuan pendidikan, khususnya di wilayah padat penduduk untuk kelancaran pelaksanaan PPDB. • Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemen PUPR RI, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI untuk mendapatkan hasil audit terkait pelaksanaan sarana prasarana pendidikan untuk memastikan tepat sasaran. • Mendukung adanya kriteria prestasi berbasis prestasi karakter masuk dalam kategori prestasi jalur afirmasi prestasi (Pramuka, OSIS, Hafidz Quran) dalam PPDB. • Mendorong agar Program Penggerak (kebijakan guru dan kurikulum) diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan lokal, seperti Bali untuk mendukung industri pariwisatanya. • Mendukung adanya sekolah berasrama (<i>boarding school</i>) SMP/SMA yang dibiayai oleh 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			APBD dan APBD yang difokuskan bagi siswa miskin untuk menempuh pendidikan berkualitas. <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamankan adanya unit layanan penyandang disabilitas di setiap Dinas Pendidikan di daerah untuk mempermudah koordinasi satuan pendidikan membuka kelas disabilitas. 	
		Tanggal 26—28 Agustus 2024 Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Provinsi Jawa Tengah.	Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB khususnya jalur zonasi. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dengan program turunannya yaitu sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan dan tantangan dalam bidang pendidikan terkait perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas guru. 	
		Tanggal 26—28 Agustus 2024 Kunker Spesifik Bidang Pendidikan ke Provinsi Jawa Timur.	Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemprov. Jatim perlu memaksimalkan dan memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta untuk meningkatkan kapasitas sekolah negeri yang hanya dapat menampung siswa sekitar 37% saja, sedangkan 62% siswa perlu ditampung oleh swasta. • Pemprov. Jatim perlu mempertimbangkan perlu/tidaknya Surat Kelakuan Baik (dari kepolisian) untuk syarat masuk sekolah (PPDB), mengingat tugas peningkatan karakter siswa adalah sekolah dan tidak perlu menyerahkannya kepada kepolisian. • Mendorong Pemprov. Jatim untuk memberikan catatan, evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan PPDB maupun Program Penggerak yang masih menjadi kendala di Jawa Timur, untuk disampaikan dan dibahas antara Komisi X dan Pemerintah (Kemendikbud RI). 	
7.	Mantan Menteri Bappenas dan Mantan Menteri Keuangan (Bambang P.S. Brodjonegoro)	Tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 14.00 WIB RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Agenda: 1. Penjelasan <i>mandatory spending</i> 20% anggaran pendidikan dalam konstitusi dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Pembahasan implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan di berbagai K/L. 3. Tinjauan hukum terhadap postur	Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mendesak Pemerintah untuk segera melakukan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk nomenklaturnya, dengan memerhatikan peta masalah pendidikan (seperti dari Kementerian PPN/Bappenas RI dan Kemendikbudristek RI), dan memastikan <i>mandatory spending</i> 20% sesuai ketentuan. • Mendesak Pemerintah agar dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan tidak menggunakan anggaran fungsi pendidikan. 	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Pemerintah untuk menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap pemda dalam hal pengalokasian 20% anggaran pendidikan dari APBD. • Mendesak Pemerintah untuk memberikan definisi yang jelas dan baku tentang anggaran pendidikan dalam setiap UU APBN. • Mendorong Pemerintah untuk memperbaiki perencanaan anggaran, kebijakan dan program agar sinkron antara pusat dan daerah, termasuk dalam hal anggaran pendidikan. 	
8.	Kemendikbudristek RI tentang Pembiayaan Pendidikan	Tanggal 7 September 2024 Pukul 09.00 WIB <i>Forum Group Discussion/</i> Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT).	Tema DKT: “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan”. Diskusi menghadirkan narasumber yaitu Drs. H. M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI 2014—2019), Dr. Dede Yusuf M. E., S.T. (Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI), M.I.Pol, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Pakar Hukum Tata Negara), Reza Rahadian (artis/influencer), Ir. Suharti (Sekjen Kemendikbudristek), Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D. (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas), serta Putut Hari Satyaka, S.E., MPP (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI).	

NO	INSTITUSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Adapun selaku pembeding menghadirkan Prof. dr. Fasli Jalal, Sp. GK., Ph.D., Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. Bertindak selaku moderator yaitu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (Wakil Ketua Komisi X DPR RI).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023.	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja tahun 2023. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Keuangan untuk APBN TA 2023 dan WTP yang ke-13 secara berturut-turut. 3. Menteri Keuangan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023, serta melaporkan kinerja tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI. 4. Menteri Keuangan dengan kewenangannya sebagai Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum Negara, akan terus memperkuat dan mempertajam kualitas belanja Kementerian/Lembaga (<i>spending better</i>) pada APBN tahun anggaran selanjutnya, yang ditunjukkan dengan kriteria dan indikator yang terukur serta prestasi kerja di setiap Kementerian/Lembaga. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Menteri Keuangan memerhatikan tata kelola dan meningkatkan kinerja pada hal-hal sebagai berikut: Kinerja pengelolaan keuangan negara di Kementerian/Lembaga, kualitas belanja Daerah, Pengelolaan piutang perpajakan, Pengelolaan investasi BLU yang bersumber dari saldo kas BLU, dan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 6. Menteri Keuangan menyampaikan laporan capaian kinerja sebagaimana kesepakatan dalam Lapsing tanggal 5 September 2022, butir 2,3,4, dan 5; serta menyampaikan capaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) di Kementerian Keuangan. 7. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
2.	Menteri PPN/Bappenas	Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian PPN/ Bappenas dalam APBN TA 2023.	Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian PPN/Bappenas untuk APBN TA 2023 dan WTP yang ke-16 secara berturut-turut. 3. Menteri PPN/Kepala Bappenas wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023 serta melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI. 4. Menteri PPN/Kepala Bappenas memperkuat sistem penganggaran yang dapat memperlihatkan alokasi anggaran program Kementerian/Lembaga yang dikaitkan dengan indikator-indikator	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>capaian dalam RPJMN, <i>mapping</i> alokasi TKD dan alokasi kegiatan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pada setiap Kabupaten/Kota pada APBN ke depan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditunjukkan dengan dampak pada pendapatan rakyat, dan penciptaan lapangan kerja pada sisi produksi pertumbuhan ekonomi.</p> <p>5. Menteri PPN/Bappenas meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Pengendalian Pembangunan Nasional; 3) Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga agar lebih berkualitas; <p>6. Menteri PPN/Kepala Bappenas meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjukkan dengan menuntaskan berbagai hambatan dan permasalahan untuk mencapai kinerja pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertumbuhan Ekonomi berkualitas; 2) Tingkat Kemiskinan; 3) Tingkat Pengangguran Terbuka; 4) Pendapatan Rakyat; 5) Rasio Gini; 6) Nilai Tukar Petani; 7) Nilai Tukar Nelayan <p>7. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3.	1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2024 dengan	Komisi XI DPR RI bersama dengan Kepala LKPP, Sekretaris Jenderal BPK, Plt. Kepala BPKP, dan Plt. Kepala BPS, dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>2. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan</p> <p>4. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik.</p>	<p>agenda Pembahasan Laporan Keuangan LKPP, BPK, BPKP dan BPS dalam APBN TA 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan tentang laporan keuangan LKPP, BPK, BPKP, dan BPS Tahun Anggaran 2023. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPP, BPK, BPKP, dan BPS untuk APBN TA 2023. 3. Sekretaris Jenderal BPK, Plt. Kepala BPKP, Kepala LKPP, dan Plt. BPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Kantor Akuntan Publik, BPK dan Komisi XI DPR RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LKPP, BPK, BPKP, dan BPS Tahun Anggaran 2023 serta melaporkan tindak lanjut tersebut kepada Komisi XI DPR RI. 4. Kepala LKPP meningkatkan kinerja LKPP yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri; 2) Meningkatkan Porsi Pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Koperasi; 3) Mewujudkan Proses Pengadaan yang Transparan; 4) Memaksimalkan Efisiensi Belanja Pemerintah; 5) Mempercepat Penyerapan Anggaran. 5. BPK meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas. 6. BPKP memperkuat dan meningkatkan pengawasan pembangunan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, mengoptimalkan penerimaan Negara/Daerah, penyelenggaraan belanja yang efektif dan efisien, dan tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel, dan sehat. 7. Pelaksana Tugas Kepala BPS meningkatkan kualitas data statistik yang digunakan sebagai basis perencanaan, monitoring, dan evaluasi bagi pemangku kepentingan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																																												
			8. Kepala LKPP, Sekretaris Jenderal BPK, Plt. Kepala BPKP, dan Plt. BPS akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.																																													
4	1. Menteri Keuangan; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; 4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda Pembahasan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2025 dan Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2025.	<p>1. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>INDIKATOR</th> <th>RAPBN 2025</th> <th>KESEPAK ATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)</td> <td>5,2</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Inflasi (% YoY)</td> <td>2,5</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)</td> <td>16.100</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)</td> <td>7,1</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SASARAN PEMBANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td> <td>4,5 – 5,0</td> <td>4,5 – 5,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td>7,0 – 8,0</td> <td>7,0 – 8,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gini Rasio (indeks)</td> <td>0,379 – 0,382</td> <td>0,379 – 0,382</td> </tr> </tbody> </table>	NO	INDIKATOR	RAPBN 2025	KESEPAK ATAN	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO				1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2	5,2	2.	Inflasi (% YoY)	2,5	2,5	3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	16.100	16.000	4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7,0	SASARAN PEMBANGUNAN				1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	4,5 – 5,0	2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7,0 – 8,0	3.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0	4.	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382	
NO	INDIKATOR	RAPBN 2025	KESEPAK ATAN																																													
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO																																																
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,2	5,2																																													
2.	Inflasi (% YoY)	2,5	2,5																																													
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	16.100	16.000																																													
4.	Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,1	7,0																																													
SASARAN PEMBANGUNAN																																																
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	4,5 – 5,0																																													
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	7,0 – 8,0																																													
3.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	0																																													
4.	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382	0,379 – 0,382																																													

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT				KETERANGAN
			5.	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,56	
INDIKATOR PEMBANGUNAN							
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	115 – 120	115 – 120				
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105 – 108	105 – 108				
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fraksi PDI-Perjuangan untuk Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp15.900/USD dan Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,9 persen. 2) Fraksi PKB untuk Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 120 – 125. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas melakukan upaya, kebijakan, dan program untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga daya beli masyarakat; 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 3) Menciptakan lapangan kerja; 4) Meningkatkan kualitas belanja Pemerintah; 5) Memperkuat dan memperluas hilirisasi; 6) Mempertajam insentif fiskal untuk mendorong investasi; 7) Mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional. 3. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas yang dicapai melalui kebijakan dan program Pemerintah (RKP), harus ditunjukkan dengan kerangka kerja logis yang memperlihatkan keterkaitan indikator pembangunan nasional prioritas, Kementerian/Lembaga yang bertugas, program-program Kementerian/Lembaga, alokasi anggaran program, <i>output</i> dan 							

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>outcome.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pertumbuhan ekonomi daerah dicapai melalui kebijakan Pemerintah melalui program-program intervensi pembangunan wilayah yang inklusif, Kebijakan Transfer Ke Daerah yang memperkuat pembangunan daerah. 5. Laporan capaian pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas beserta indikator-indikator sebagaimana yang dimaksud pada butir 2, 3, dan 4 dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025. 6. Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengendalikan inflasi, ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). 7. Pemerintah mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan <i>tax ratio</i>, melaksanakan UU HPP; Pemanfaatan <i>core tax system</i>, Ceisa, SIMBARA; serta meningkatkan kinerja dan tata kelola penagihan pajak. Laporan Panja Penerimaan pada Rapat Kerja tanggal 6 Juni 2024, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan asumsi makro pertumbuhan ekonomi. 8. Pemerintah akan menyampaikan rencana pelaksanaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. 9. Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt. Kepala BPS akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan/tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 2 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) DR. BLUCER W. RAJAGUKGUK, SE., SH., MH., M.SC., AK., CPA., CSFA., CFRA., CA., CFE; 2) EVA YULIANA, S.Ag.,M.Si; 3) DR. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE., MH; 4) BUDI SANTOSO, SE., Ak., MForAccy, PGCS., CA., CFE., CPA(Aust.), QIA; 5) DR. H. ERRYL PRIMA PUTERA AGOES, SH., MH; 6) DR. REZA RONALDO, MM., CGI., APAI., CIIB., ANZIIF (Senior Associate), CIP., CRGP., CRMP., CHRP., CCIP., CIMM., AIIS., FIIS.; 7) Prof. DR. THOMAS PENTURY, M.Si; 8) ARIEF WICAKSONO CAHYADI; 9) Dr. (c), Drs. HENDRIK H SITOMPUL, MM; 10) ANDRY PRIHANDONO, S.H., M.H.; 11) PROF. Dr. M. AFIF HASBULLAH, SH., M.Hum. 2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi. 	
6.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 2 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) H. MOHAMMAD SUPRIYADI, ST., MT; 2) MULFACHRI HARAHAP, SH., MH; 3) Dr. H. JON ERIZAL, SE., MBA; 4) Ir. DANIEL LUMBAN TOBING, M.Sc.,CSFA.,CfrA; 5) Dr. Ir. IZHARI MAWARDI, B.Eng., S.AP., MPP.,IPU., ASEAN. Eng.; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> 6) PROF. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D.; 7) Prof. Drs. HADRI KUSUMA, MBA.,DBA; 8) I DEWA MADE TIRTA MEIRSHA, SE., M.Agb.; 9) Dr. AKHSANUL KHAQ; 10) YULI KRISTIYONO; 11) LUSIANA HERAWATI, S.E., M.M., <p>2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi. 	
7.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 2 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) H. MARWAN IDRIS, SE, MM., CFrA., CQRMP, CRGP; 2) H. BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE.Ak, M.B.A., C.F.E., C.A.; 3) Prof. Dr. CHANDRA WIJAYA, M.Si., MM; 4) Ir. DUMOLY FREDDY PARDEDE, M.B.A. 5) ARMEN MESTA; 6) PROF. AGUNG NUR PROBOHUDONO, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CFrA; 7) BAMBANG PRIJAMBODO; 8) AGUS PURUHITAARGA PURNOMO WIDODO, SE., MBA., Ph.D., CRMP., QIA., CGCAE., CACP; 9) Dr. Ir. RACHMAT M PURBA, SE., SH., MM., MAPPI (Cert); 10) Dr. Ir. HENDRA SUSANTO, ST., M.Eng., MH., CFrA., CSFA., CIAE., CGCAE., CertDA., CIISA.,CFA; 11) Dr. BUDI PRIJONO, ST., MM., CFrA., GRCE., CGCAE. 2. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 atas nama Ir. Dumoly Freddy Pardede, M.B.A. mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Calon Anggota BPK Periode 2024-2029. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
8.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 3 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) CHARLES PANJI DEWANTO 2) INDRA KRISNA 3) NEHSEH BANGUN 4) PROF. Dr. DADANG SUWANDA, SE., MM., M.Ak., Ak.,CA., 5) R. ARYO BILOWO 6) SALAMAT SIMANULLANG (mengundurkan diri) 7) Drs. FATHAN, M.A.P. 2. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 atas nama Salamat Simanullang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Calon Anggota BPK Periode 2024-2029. 3. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
9	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 3 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) HASBI ANSHORY, SE., MM; 2) HARRY Z. SOERATIN; 3) TAMSIL AINNUR RIZAL; 4) Dr. MUHAMMAD SYARKAWI RAUF, SE., MSE.; 5) DR. HARIS SARWOKO, SE.,M.Si; 6) Dr. BASYIRUDDIN NUR, M.Ak.,CPI.,CA.,CPA.;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7) PROF. Dr. ISTIANINGSIH, M.S.Ak., Ak., CA. 2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
10.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 3 September 2024 dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) Dr. Ir. SLAMET SOEDARSONO, MPP., QIA., CRMP., CGAP., CACP.; 2) Dr. JULIZAR IDRIS, M.Si, CPA; 3) SIDHARTA WISNU WARDHANA, S.H., M.B.A.; 4) DR (Hukum) DR (Kebijakan Publik). H. HADI PURNOMO, SH., MH.,ST.,MM., CLA.CMN; 5) WAHYU GUNARTO; 6) Dr. A. MUH. YUSLIM PATAWARI, S.STPi., MP.; 7) Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 8) OKTAVIANTO HERNAWAN 2. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 atas nama Drs. H. Akhmad Muqowam mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Calon Anggota BPK Periode 2024-2029. 3. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
11.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 4 September 2024 dengan agenda Uji	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) BONARDO PARDOMUAN HASIHOLAN SINAGA, S.H., MH.; 2) BUNYAMIN, S.E., M.H., Ak., QIA, QCRO;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Keputusan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	3) TRI ENDAH WAHYUNINGSIH, SE.; 4) Dr. ROZIQUIN, S.H., M.Si., CLA. CfrA; 5) I B PUTU ANOM REDHI, SH.,MM.,QIA; 6) PAULINUS ARI PURBOWO; 7) H. ABDUL ROUF, SE.,Akt.,MM. 2. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) Curriculum Vitae Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
12.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 4 September 2024 dengan agenda Uji Keputusan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Keputusan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) Dr. YOYO ARIFARDHANI, SH., MM., LL.M; 2) ANDRI YUDA SIAHAAN; 3) ASTILDA SINABUTAR, SE.,MM.,Ak.,CA; 4) GELLY SUSANTRY, SH., SE., MM; 5) H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M; 6) ENDAH SRICAHYANI SUCIPTO. M.Si; 7) LAODE NUSRIADI, SE.,M.Si.,Ak.,CSFA. 2. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 atas nama H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Calon Anggota BPK Periode 2024-2029. 3. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
13.	Calon Anggota BPK Periode 2024-2029	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan tanggal 4 September 2024	1. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 yang mengikuti Uji Keputusan dan Uji Kelayakan sebagai berikut: 1) POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dengan agenda Uji Kepatutan dan Uji Kelayakan Calon Anggota BPK Periode 2024-2029.	2) Dr. AHMAD ADIB SUSILO, SE., MSc., Ak., CGAE., CA.,CSFA., ERMCP., CGCAE, CfrA; 3) Ir. YVES S. PALAMBANG; 2. Calon Anggota BPK Periode 2024-2029 atas nama ZAINI RAHMAN dan GUNAWAN SETIYAJI, S.H., M.H., M.Stud. Ak., CA. mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Calon Anggota BPK Periode 2024-2029. 3. Masing-masing calon memaparkan materi sebagai berikut: 1) <i>Curriculum Vitae</i> Calon Anggota BPK Periode 2024-2029; 2) Judul atau Tema materi; 3) Visi dan Misi; 4) Ringkasan singkat materi.	
14.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rapat Konsultasi dilaksanakan tanggal 5 September 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK RI dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2025.	Tertutup.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024 dengan agenda:	Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan dan Pengesahan Jadwal Kegiatan Komisi XI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; Dan lain-lain. 		
2	DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA	<p>Audiensi DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA dengan Komisi XI DPR RI terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>RDPU dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Komisi XI DPR RI telah menerima Audiensi DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA yang berjumlah 18 peserta; Komisi XI DPR RI dengan DPP REI, DPP APERSI, dan DPP HIMPERRA telah melakukan diskusi terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bahwa terjadi penurunan jumlah kuota dari 200 ribu unit pada tahun 2022 dan 220 ribu unit pada tahun 2023 menjadi 166 ribu unit pada tahun 2024. 	
3	DPRD Kabupaten Simalungun	<p>Menerima DPRD Kabupaten Simalungun terkait Konsultasi dan Koordinasi mengenai Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024 dan persiapan penyusunan Rancangan APBD TA 2025.</p> <p>RDPU dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Komisi XI DPR RI telah menerima DPRD Kabupaten Simalungun yang berjumlah 21 peserta; Komisi XI DPR RI dengan DPRD Kabupaten Simalungun telah melakukan diskusi terkait dengan Konsultasi dan Koordinasi mengenai Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024 dan persiapan penyusunan Rancangan APBD TA 2025. 	
4	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	<p>Rapat dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2024 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengambilan Keputusan Calon Anggota BPK Membahas Surat Masuk: Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus menugaskan Komisi XI DPR RI untuk 	Tertutup.	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 - 2025
(16 Agustus - 7 September 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		membahas RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; 3. Pembahasan perubahan Jadwal Kegiatan Komisi XI DPR RI.		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDU RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan Badan Legislasi, Jumat, 16 Agustus 2024 pukul 12.45 WIB dalam rangka penyusunan Jadwal Acara Rapat Baleg Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.	-	
2.	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Senin, 19 Agustus 2024 pukul 13.33 WIB dalam rangka pembahasan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil perumusan/sinkronisasi materi RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 2. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap hasil pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025—2045 akan dilaksanakan pada Senin, 19 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB. 	
3.		Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Senin, 19 Agustus 2024 pukul 15.15 WIB dalam rangka pembahasan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Ketua Panja pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045. 2. Berdasarkan pandangan 9 (sembilan) Fraksi (F-PKS, F-PDI Perjuangan, F-PG, F Pgerindra, F-NasDem, F-PKB, F-Pdemokrat, F-PAN, dan F-PPP) menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
4.	RUU tentang Perubahan Keempat	Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 21	1. Rancangan jadwal rapat dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	

NO	JUDU RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang</p>	<p>Agustus 2024 pukul 10.34 WIB dalam rangka pembahasan RUU.</p>	<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Pembahasan RUU dilakukan sesuai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPD RI; 3. DIM RUU yang bersifat tetap langsung disetujui, adapun untuk DIM RUU yang bersifat perubahan redaksional dan perubahan substansi dibahas dalam Panja dan Rapat Panja dijadwalkan tanggal 21 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB.</p>	
5.		<p>Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 10.52 WIB dalam rangka pembahasan DIM RUU.</p>	<p>Menyetujui/menyepakati: 1. Pembahasan terhadap DIM yang bersifat Substantif di mulai dari DIM Nomor 2 dst sampai dengan DIM Nomor 179 yang diusulkan untuk dihapuskan; 2. Panja menugaskan Timus/Timsin membahas DIM yang bersifat perubahan redaksional dan yang ditugaskan oleh Panja.</p>	
6.		<p>Rapat Timus/Timsin Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 12.05 WIB dalam rangka membahas rumusan materi pasal RUU.</p>	<p>Menyetujui/menyepakati: 1. Penyempurnaan materi sebagaimana diamankan oleh Panja 2. Laporan Ketua Timus/Timsin kepada Panja dijadwalkan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.</p>	
7.	<p>RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-</p>	<p>Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 14.19 WIB dalam rangka laporan ketua Timus/Timsin atas perumusan/sinkronisasi materi RUU.</p>	<p>Menyetujui/menyepakati: 1. Menerima laporan Ketua Timus/Timsin atas perumusan/sinkronisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2. Rapat Kerja Pengambilan keputusan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-</p>	

NO	JUDU RUU/PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang		Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB.	
8.	Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 15.33 WIB dalam rangka pengambilan keputusan hasil pembahasan RUU.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menerima Laporan Ketua Panja pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 2.Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PG, F-PKS, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1 (satu) Fraksi yaitu F-PDI Perjuangan tidak sependapat RUU di proses lebih lanjut dalam rapat Paripurna DPR RI. 	
9.	-	Rapat Pleno Badan Legislasi, Senin 26 Agustus 2024 pukul 10.12 WIB dalam rangka pembahasan tindak lanjut RUU yang ditugaskan kepada Badan Legislasi oleh Bamus DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1.Akan membahas RUU yang telah memiliki Surpres dan DIM 2.Optimalisasi dalam mengerjakan RUU yang akan dibahas pada masa persidangan terakhir masa jabatan Periode Anggota 2019-2024 3.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak akan dibahas pada Periode Keanggotaan DPR RI 2019-2024 dan diserahkan kepada Periode Keanggotaan selanjutnya. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB – BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Serbia dilaksanakan pada 18 – 24 Agustus 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Serbia mengadakan kunjungan ke Serbia pada tanggal 18 – 24 Agustus 2024. Delegasi GKSB Serbia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairul Anwar (F-PKS) / Ketua GKSB Serbia 2. Dewi Aryani (F-PDIP) / Anggota GKSB Serbia 3. Sely Andriany Gantina (F-PDIP) / Anggota GKSB Serbia 4. Saniatul Lativa (F-PG) / Anggota GKSB Serbia 5. Felly Estelita Rutuwene (F-PNASDEM) / Anggota GKSB Serbia 6. Irma Suryani (F-PNASDEM) / Anggota GKSB Serbia 7. Dian Istiqomah (F-PAN) / Anggota GKSB Serbia 8. Hermanto (F-PKS) / Anggota GKSB Serbia 9. Ahmad Junaidi Auly (F-PKS) / Anggota GKSB Serbia <p>Dalam kunjungan tersebut, GKSB Serbia mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Persahabatan Parlemen Serbia – Indonesia GKSB DPR RI – Parlemen Serbia mengadakan pertemuan dengan counterpartnya yaitu Kelompok Persahabatan Parlemen Serbia – Indonesia yang dipimpin oleh Hon. Mr. Miroslav Petrasinovic di Gedung Majelis Nasional, Beograd (21/08/24). Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Kelompok Persahabatan Parlemen Serbia diantaranya Mrs. Danijela Vujicic, Mrs. Stasa Stojanovic, Mr. Tomislav Jankovic. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua negara sepakat untuk menjajaki peluang baru dalam bidang perdagangan, dengan rencana pembukaan kantor dagang masing-masing di Beograd dan Jakarta. Upaya ini diharapkan akan mendorong pertukaran produk unggulan dan investasi yang saling menguntungkan, sekaligus memperdalam hubungan ekonomi bilateral.</p> <p>Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kedua negara. Serbia mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam hal ini dan menyarankan kerja sama lebih lanjut melalui program-program yang mendukung peningkatan representasi perempuan di politik dan sektor lainnya. Pertemuan tersebut juga menekankan perlunya inisiatif budaya dan sosial yang lebih banyak untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan antar masyarakat.</p> <p>Kedepannya, kedua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi melalui dialog antarpemerintahan yang berkelanjutan. Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya pada level pemerintahan tetapi juga bagi masyarakat kedua negara. Dengan semangat kemitraan yang kuat, Indonesia dan Serbia siap untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat di masa depan.</p> <p>2. KBRI Beograd Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Serbia juga berkesempatan untuk mengadakan working dinner dengan Duta Besar LBBP RI untuk Republik Serbia merangkap Montenegro, Y.M. Bapak M. Chandra Widya Yudha di Wisma Duta Beograd.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pada Pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI, Chairul Anwar (F-PKS), menyampaikan apresiasi kepada KBRI Beograd atas dukungan yang telah diberikan dalam mewujudkan diplomasi parlemen. Kunjungan ini memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Serbia yang sudah terjalin lama, sekaligus membuka peluang baru di berbagai sektor, seperti investasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif.</p> <p>Parlemen Indonesia senantiasa mendukung kolaborasi dalam forum-forum internasional, serta pertukaran pandangan dengan parlemen Serbia mengenai isu-isu strategis, termasuk penegakan HAM, demokrasi, dan perdamaian. Ketua GKSB juga mengajak untuk memanfaatkan keanggotaan di berbagai forum parlemen internasional guna memperluas pengaruh dan mempererat kerja sama multilateral.</p> <p>Ke depan, DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung penguatan hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Serbia, serta memastikan bahwa warga negara Indonesia di Serbia mendapatkan perhatian dan dukungan yang optimal. Melalui diplomasi parlemen yang aktif, diharapkan hubungan kedua negara dapat berkembang lebih dinamis dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.</p>	
2.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Thailand dilaksanakan pada 18 – 24 Agustus 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Thailand mengadakan kunjungan ke Thailand pada tanggal 18 – 24 Agustus 2024. Delegasi GKSB Thailand terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khilmi (F-PGerindra) / Ketua GKSB Thailand 2. Hj. Sadarestuwati (F-PDIP) / Anggota GKSB Thailand 3. Dr. Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) / Anggota GKSB Thailand 4. Idah Syahidah (F-PG) / Anggota GKSB Thailand 5. Dr. Endang Setyawati Thohari (F-PGERINDRA) / Anggota GKSB Thailand 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. Andi Ruskati Ali Baal (F-PGERINDRA) / Anggota GKSB Thailand 7. Abdul Wachid (F-PGerindra) / Anggota GKSB Thailand 8. Siti Maryam (F-PNASDEM) / Anggota GKSB Thailand 9. Iskan Qolba Lubis (F-PKS) / Anggota GKSB Thailand 10. Mustafa Kamal (F-PKS) / Anggota GKSB Thailand 11. Dr. Kurniasih Mufidayati (F-PKS) / Anggota GKSB Thailand</p> <p>Dalam kunjungan tersebut delegasi mengadakan pertemuan dengan: 1. Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, YM. Bapak Rachmat Budiman dan jajaran staf KBRI di KBRI Bangkok Kunjungan kerja Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Thailand diawali dengan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand beserta jajarannya, YM. Bapak Rachmat Budiman dan jajaran staf KBRI di KBRI Bangkok (19/8/2024) .</p> <p>Dalam sambutannya, selain memberikan paparan terkait tugas Grup Kerja sama Bilateral ini, Ketua Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Thailand, Bapak Khilmi (F-PGerindra) yang merupakan Anggota Komisi VI juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan parlemen dalam memperkuat hubungan dan kerja sama antara Indonesia dengan Thailand, melalui kerja sama antar parlemen, karena penguatan hubungan kedua negara juga membutuhkan dukungan dari parlemen (<i>parliamentary diplomacy</i> atau <i>second track diplomacy</i>).</p> <p>Ketua GKSB menyampaikan bahwa dalam kunjungan ke KBRI ini diharapkan delegasi mendapatkan masukan, gambaran dan pendampingan dari Duta Besar RI terkait situasi ekonomi-politik,</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>hubungan perdagangan Indonesia-Thailand, khususnya <i>stakeholder</i> yang akan ditemui oleh delegasi GKSB DPR RI- Parlemen Thailand.</p> <p>2. Mr. Phicet Phopakdee (Deputy Permanent Secretary), Kementerian Pendidikan Thailand.</p> <p>Di awal sambutannya, selain memberikan paparan terkait tugas Grup Kerja sama Bilateral ini, Ketua Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Thailand, Bapak Khilmi (FP. Gerindra) yang merupakan Anggota Komisi VI dan membidangi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, menyampaikan bahwa Delegasi GKSB DPR RI apresiasi atas pendirian <i>Indonesia Study Center (ISC)</i> di belasan universitas lain di Thailand.</p> <p>Ketua Delegasi GKSB DPR RI menyampaikan pula bahwa Sejak tahun 2011, Kementerian Pendidikan Indonesia telah memiliki nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Thailand di bidang pendidikan dan pertukaran budaya. Hal ini dapat menjadi dasar kerja sama pendidikan kedua negara.</p> <p>Delegasi GKSB DPR RI –Parlemen Thailand melihat bahwa banyak pelajar Thailand menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama untuk menempuh pendidikan, khususnya untuk jenjang universitas. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak lebih dari 2.500 mahasiswa Thailand belajar Bahasa Indonesia yang menjadi mata kuliah di berbagai universitas di Thailand.</p> <p>Delegasi GKSB DPR RI berharap kerja sama pendidikan dengan Thailand ini dapat terus ditingkatkan dan lebih banyak lagi pertukaran pemuda/pelajar, pendidikan vokasi, dan pertukaran para pengajar. serta sharing penelitian antar kedua negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Mr. Sedthakiat Krajawongs, Deputy Permanent Secretary, Kementerian Pertanian dan Koperasi Kerajaan Thailand</p> <p>Di awal sambutannya, Ketua Delegasi menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian menjadi salah satu sektor vital dalam perekonomian negara dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan masyarakat, penghasil devisa negara dan penyediaan bahan baku industri.</p> <p>Ketua Delegasi GKSBR DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia dan Thailand telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kerja sama di bidang pertanian. Hal ini diperkuat dengan MoU terkait pertanian yang dimiliki oleh kedua negara, mencakup kerja sama perluasan akses pasar dan investasi komoditas pertanian.</p> <p>Delegasi GKSBR DPR RI- Parlemen Thailand ingin mengajak Pemerintah Thailand untuk berkolaborasi dengan Pemerintahan Indonesia dalam pengolahan lahan ini. Mengingat Thailand sendiri memiliki pengalaman dalam mengelola lahan kering dan basah (<i>swampland</i> dan <i>wetland</i>).</p> <p>4. Wakil Ketua Ketua II Parlemen Thailand, YM. Mr. Pichet Pichet Chuamuangphan</p> <p>Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen Thailand yang dipimpin oleh Khilmi (F.P.Gerindra) ke Thailand melakukan Kunjungan Kehormatan kepada Wakil Ketua Ketua II Parlemen Thailand, YM. Mr. Pichet Pichet Chuamuangphan di Gedung Parlemen, Bangkok (19/8/2024).</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Ketua GKSB DPR RI –Parlemen Thailand mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia dengan Thailand pada kerja sama politik dan ekonomi.</p> <p>Untuk diketahui bahwa komoditas ekspor utama Indonesia ke Thailand antara lain: bahan bakar fosil, batu bara, tembaga, baja tahan karat, dan bahan kimia, sedangkan komoditas ekspor utama Thailand ke Indonesia antara lain: otomotif (mobil & sepeda motor) dan suku cadangnya, perangkat elektronik, gula.</p> <p>Sektor pertanian juga merupakan fokus bahasan pada pertemuan tersebut. Thailand sebagai negara agrikultur yang menitikberatkan produksi di sektor pertanian dan kesemuanya dijalankan melalui beberapa riset yang tercermin dengan produk-produk unggulannya seperti beras dan buah-buahan yang telah tersertifikasi dan diakui di kalangan internasional.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II Parlemen Thailand menyambut baik kunjungan Delegasi GKSB DPR RI dan berharap kunjungan ini akan meningkatkan hubungan baik diantara kedua parlemen dan kedua pemerintah baik melalui saling kunjung-mengunjungi dan peningkatan kerja sama kedua pemerintah diberbagai sektor.</p> <p>Delegasi GKSB DPR RI berkesempatan <i>tour building</i> di dalam Gedung parlemen Kerajaan Thailand yang baru.</p>	
3.	KSR - BKSAP	<i>ASEAN Region Carbon Trading Workshop</i> dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-PD), menghadiri <i>ASEAN Region Carbon Trading Workshop</i> yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dengan tema " <i>Building Better Markets through Digitalization,</i> " pada Kamis, 22 Agustus 2024 di Jakarta.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan menggarisbawahi pentingnya pasar karbon dalam menghadapi perubahan iklim, serta potensi perdagangan karbon bagi ASEAN—baik di dalam maupun lintas kawasan.</p> <p>Putu Supadma Rudana menjelaskan tentang potensi Indonesia yang memiliki 75% dari total stok karbon dunia, sebagai penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme <i>offset</i>. Ia menyerukan penguatan kerja sama agar Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain sebagai <i>benchmark</i>. Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pasar karbon Indonesia, menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional, dan memastikan pengelolaan pasar yang transparan melalui Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang baru saja dibentuk.</p> <p>Putu juga menyerukan pembentukan sistem perdagangan karbon yang inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat, di samping menjadi alat bagi mitigasi emisi yang efektif.</p> <p>Workshop ini dihadiri oleh berbagai ahli dan <i>stakeholders</i> dari Amerika Serikat dan Asia Tenggara, sekaligus sebagai platform diskusi terkait pentingnya digitalisasi dalam memperkuat pasar karbon sukarela (<i>VCM - Voluntary Carbon Market</i>), dan mendorong perdagangan karbon yang berintegritas di ASEAN.</p>	
4.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan Mantan Perdana Menteri Palestina dilaksanakan 26 Agustus 2024.	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Mantan Perdana Menteri Palestina, H.E. Dr. Mohammad Shtayyeh pada hari Senin (26/08/2024) di Gedung Nusantara III DPR RI. Mantan Perdana Menteri Palestina, H.E. Dr. Mohammad Shtayyeh menyampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada BKSAP atas komitmen terhadap mendukung perjuangan Palestina. Kedua pihak juga	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sepakat dan menekankan pentingnya persatuan masyarakat Palestina serta dukungan komunitas internasional dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Kedepannya BKSAP akan terus mendukung tercapainya kemerdekaan Palestina.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Dr. Zuhair Al -Shun.</p>	
5.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Maroko dilaksanakan pada 31 Agustus - 6 September 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Maroko mengadakan kunjungan ke Maroko pada tanggal 31 Agustus - 6 September 2024. Delegasi GKSB Maroko terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aboe Bakar Alhabsy (F.PKS) - Ketua Delegasi 2. Vita Ervina (F.PDIP) - Anggota Delegasi 3. Mufti A.N. Anam (F.PDIP) - Anggota Delegasi 4. Wenny Haryanto (F.PG) - Anggota Delegasi 5. Prof. Djohar Arifin Husin (F.P. Gerindra) - Anggota Delegasi 6. Maman Imanul Haq (F.PKB) - Anggota Delegasi 7. Vera Febyanthi (F.PD) - Anggota Delegasi 8. Dr. Netty Prasetyani (F.PKS) - Anggota Delegasi 9. Slamet Ariyadi (F.PAN) - Anggota Delegasi 10. Guspari Gaus (F.PAN) - Anggota Delegasi <p>Dalam kunjungan tersebut delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <p>1. Direktur Pusat Investasi Regional Marrakesh - Safi, Mr. Mohammed Amine Sabibi dan jajarannya pada tanggal 2 September 2024.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dipaparkan tugas dan fungsi badan investasi ini. Hubungan erat antara Indonesia - Maroko yang telah terjalin sejak lama hendaknya dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang, termasuk dalam hal investasi kedua negara.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Badan ini dibentuk untuk memudahkan investor berinvestasi di Maroko. Ada 12 region yang ditangani badan yang menangani investasi, salah satunya adalah di wilayah Marrakesh dan Safi ini.</p> <p>Beberapa produk andalan Maroko yang masih terbuka untuk investasi antara lain dalam bidang mineral dan batubara, fosfat, pariwisata, <i>manufacturing</i>, perikanan, energi baru dan terbarukan maupun dalam hal teknologi pertanian.</p> <p>Beberapa peluang investasi lainnya antara lain dalam hal perdagangan produk kopi, produk halal, wisata religi, maupun produk pupuk.</p> <p>2. Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko dan Republik Islam Mauritania, Y.M. Hasrul Azwar dan jajaran KBRI Rabat serta perwakilan masyarakat Indonesia di Maroko di Wisma Indonesia di Rabat, Maroko.</p> <p>Ketua delegasi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Dubes RI di Rabat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan memfasilitasi sehingga kunjungan delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Maroko dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan penerimaan yang sangat baik oleh Parlemen Maroko. Sambutan hangat telah diterima delegasi sejak ketibaan di Casablanca dan terus berlanjut.</p> <p>Dubes menyampaikan update perkembangan di Maroko. Pemerintah Maroko sangat menghargai Indonesia, hubungan erat antar kedua negara terus meningkat. Di Maroko ada jalan Soekarno, jalan Jakarta, di Indonesia ada jalan Casablanca. Pemerintah Maroko juga berkomitmen memberikan tambahan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang belajar di Maroko. Saat ini jumlah beasiswa yang</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>diberikan adalah sebanyak 50 beasiswa per tahun. Disampaikan pula bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang ada di Maroko adalah pelajar.</p> <p>Dalam diskusi dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Maroko, delegasi memberikan update info di tanah air termasuk perkembangan hasil pemilu, situasi politik dalam negeri, proyeksi pemerintahan baru serta memberikan semangat dan motivasi bagi mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Maroko.</p> <p>3. Ketua Parlemen Maroko H.E. Mr. Racid Talbi El- Alami Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal diantaranya komitmen kedua parlemen untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, dukungan untuk peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, sosial budaya serta kerja sama di berbagai forum internasional seperti di IPU dan PUIC termasuk dukungan atas perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya.</p> <p>Parlemen Maroko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia shg Parlemen Maroko dapat menjadi <i>observer</i> dalam forum AIPA. Maroko juga mengapresiasi Indonesia yang dapat membawa spirit KAA dan menyelenggarakan Forum Parlemen Asia Afrika dengan sukses dan lancar.</p> <p>Dalam bidang ekonomi dan perdagangan disampaikan bahwa masih banyak peluang kerja sama yang dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya kebijakan bebas biaya masuk, diharapkan lebih banyak produk Indonesia yang masuk Maroko dan sebaliknya.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pemerintah Maroko juga telah menyetujui pemberian beasiswa bagi 50 mahasiswa Indonesia setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan hubungan antar masyarakat Maroko - Indonesia.</p> <p>4. Wakil Ketua Majelis Tinggi Kerajaan Maroko Mr. Fouad Kadiri dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal diantaranya komitmen kedua parlemen untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, dukungan untuk peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, sosial budaya, olah raga serta kerja sama di berbagai forum internasional termasuk dukungan atas perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya.</p> <p>Setelah pertemuan, delegasi berkesempatan melakukan <i>tour building</i> parlemen.</p> <p>5. Grup Persahabatan Parlemen Maroko - Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Abdellatif El-Foikar dan jajarannya</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal diantaranya komitmen kedua parlemen untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, baik dalam forum bilateral seperti pertukaran saling kunjung kedua parlemen, saling dukung di berbagai forum internasional termasuk dukungan atas perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penguatan fungsi parlemen di kedua negara termasuk pentingnya keterwakilan perempuan dan pemuda di parlemen sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang bisa mewakili semua kalangan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Selain itu, kedua pihak juga memandang perlunya peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam hal investasi, perdagangan, sosial budaya dan juga saling dukung dalam hal integritas kedaulatan negara.</p> <p>6. Komisi Luar Negeri, Pertahanan Nasional, Urusan Islam dan Ekspatriat Maroko yang dipimpin oleh Ms. Salma Benaziz dan jajarannya. Selain membahas komitmen kedua parlemen untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen, baik dalam forum bilateral seperti pertukaran saling kunjung kedua parlemen, saling dukung di berbagai forum internasional termasuk dukungan atas perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan pentingnya menjaga hubungan baik kedua negara yang telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Hubungan baik ini bisa terus terjaga dengan adanya saling percaya, saling mendukung termasuk dalam hal teritorial negara masing-masing.</p> <p>Maroko menghargai Indonesia yang dipandang tidak mendukung upaya gerakan separatisme dan dapat membawa spirit Konferensi Asia Afrika, terbukti dalam penyelenggaraan Forum Asia-Afrika yang baru saja selesai dilaksanakan di Bali dengan sukses dan lancar. Kedua pihak juga sependapat bahwa menjaga perdamaian dunia harus bisa dilakukan tanpa penggunaan senjata.</p> <p>Selain itu, kedua pihak juga memandang perlunya peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk dalam hal investasi, energi baru dan terbarukan, perdagangan, dan sosial budaya.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>7. Mr. Mohammed El-Hejra, Ketua Komisi Pengawasan Keuangan Publik Luar Negeri Parlemen Maroko dan jajarannya. Mr. El-Hejra menjelaskan fungsi dan tugas pokok komisi yang dipimpinnya dalam hal pengawasan keuangan publik. Komisi ini memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga serupa yang juga dimiliki oleh DPR RI yaitu BAKN.</p> <p>Kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan negara ini diharapkan dpt menciptakan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara dan meminimalisir terjadinya korupsi.</p> <p>Lembaga ini dapat memberikan rekomendasi atas hasil kerjanya dan rekomendasi ini harus dipatuhi dan bersifat mengikat semua instansi pemerintah. Sampai saat ini 95% dari rekomendasi komisi ini telah ditanggapi dengan baik oleh Pemerintah.</p> <p>DPR RI memandang baik adanya komisi tersebut dan menyampaikan komisi serupa juga ada di DPR RI namun dengan kewenangan yang lebih mengikat kedalam. Diharapkan komisi ini dapat melakukan tugasnya dengan baik dan terjaga independensi dan kredibilitasnya.</p>	
6.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Fiji pada 1 - 7 September 2024.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Fiji mengadakan kunjungan ke Fiji pada tanggal 1 - 7 September 2024. Delegasi GKSB Fiji terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mohamad Muraz (Partai Demokrat) Ketua Delegasi 2. Heru Sudjatmoko (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 3. ST. Ananta Wahana (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 4. Cornelis Fraksi (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 5. Novri Ompusunggu (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. Aida Muslimah (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 7. Riyanta (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 8. Irmadi Lubis (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 9. Djarot Saiful Hidayat (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 10. Agung Widyantoro (Partai Golkar), Anggota Delegasi 11. Rahmad Handoyo (PDI-Perjuangan), Anggota Delegasi 12. Ongku P Hasibuan (Partai Demokrat), Anggota Delegasi</p> <p>Dalam kunjungan tersebut delegasi mengadakan pertemuan dengan: 1. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito Simamora Delegasi Grup Kerja sama Bilateral DPR RI- Parlemen Fiji melakukan pertemuan dengan pihak KBRI Suva yang dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito Simamora. Pertemuan ini dilaksanakan untuk berdialog mengenai situasi domestik, isu-isu yang berkembang dan apa yang dapat didorong dari sisi Parlemen ke depan dalam memepererat hubungan bilateral kedua negara. Terkait hal ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji, menyampaikan berbagai informasi dan isu strategis terkait Republik Fiji yang dapat menjadi pertimbangan untuk ditindak lanjuti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 tahun Kerja sama Fiji dan Indonesia 2. <i>People to people collaboration</i> melalui pembentukan <i>Fiji Indonesia Friendship Association (FIFA)</i> 3. Pendidikan dan Pertanian 4. Peningkatan kapasitas melalui kerangka Selatan-Selatan 5. Keamanan dan Pertahanan 6. <i>Fiji-Indonesia Parliament Friendship Group</i> 7. <i>Indonesia Pacific Parliamentary Friendship Group</i> 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu beserta para Anggota Parlemen dari Komisi Luar Negeri dan Pertahanan</p> <p>Grup Kerja sama Bilateral DPR RI - Parlemen Fiji yang dipimpin oleh Mohamad Muraz (Partai Demokrat) berkesempatan melakukan Pertemuan dengan Ketua Parlemen Fiji Ratu Naiqama Lalabalavu beserta para Anggota Parlemen dari Komisi Luar Negeri dan Pertahanan dalam jamuan makan siang bertempat di Hotel Grand Pacific Suva.</p> <p>Ratu Naiqama Lalabalavu menyampaikan bahwa kunjungan GKSB DPR RI-Parlemen Fiji merupakan suatu kehormatan bagi Parlemen Fiji dan kesempatan yang berharga dalam memperkuat hubungan kerja sama, dan kemitraan di antara kedua parlemen. Pada kesempatan ini pula, Ketua Parlemen Fiji menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Indonesia atas berbagai intervensi dan bantuan pembangunan di Fiji diantaranya rehabilitasi sekolah, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bawah Kerangka Kerja Kerja Sama <i>south to south</i>, dan pembangunan pusat penelitian pertanian. Ratu juga menyampaikan harapannya bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat membantu dalam peningkatan dan perluasan ruang kerja Parlemen dikarenakan bertambahnya jumlah anggota parlemen dan komposisi politik anggota oposisi yang semuanya merupakan Anggota Independen.</p> <p>Dalam diskusi ini, Mohammed Muraz menyampaikan bahwa kunjungan Delegasi GKSB DPR RI ke Fiji ini sebagai upaya mendekatkan dan memperkuat hubungan antarmasyarakat (<i>people-to-people</i>) kedua negara serta kolega antarparlemen di kawasan Pasifik. Legislator dari Komisi II ini juga menyampaikan bahwa Fiji adalah mitra Indonesia yang vital di kawasan Pasifik. Hubungan diplomatik</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang telah terjalin selama lima dekade, diharapkan akan semakin kuat kedepannya diberbagai bidang. Ketua delegasi mengapresiasi peran sentral Fiji dalam organisasi kawasan melalui <i>Pacific Islands Forum</i> (PIF) dan sub-kawasan <i>Melanesian Spearhead Group</i> (MSG). Kedua parlemen berharap agar hubungan kerja sama terus terjalin baik dan menggali potensi-potensi kerja sama diberbagai bidang baik ekonomi, perdagangan, maupun pertahanan antarkedua negara yang belum terpetakan dan berpotensi menjadi sektor kerja sama andalan lebih lanjut bagi Indonesia dan Fiji.</p> <p>3. Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Fiji Bertempat di Wisma Republik Indonesia, Grup Kerja sama Bilateral DPR RI-Parlemen Fiji melakukan pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Fiji. Ketua Delegasi menyampaikan turut mengapresiasi terbentuknya <i>Fiji Indonesia Friendship Association</i> (FIFA) yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia dalam memperkuat hubungan antar-masyarakat di kedua negara melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Salah satu delegasi, Cornelis juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus terus menjaga sikap dan nama baik Indonesia selama bertempat tinggal di Fiji.</p> <p>Masyarakat Indonesia di Fiji juga berkesempatan berdialog langsung dengan para legislator terkait pengalaman mereka selama bertempat tinggal di Fiji. Salah satu anggota masyarakat, Yemi Lee, menyampaikan permasalahan yang terjadi di Fiji ialah terkait kurangnya tenaga kerja terampil karena banyaknya tenaga kerja Fiji yang pindah ke Luar Negeri. Hal ini dikarenakan rendahnya upah minimum regional di Fiji sementara biaya hidup disini cukup tinggi. Kondisi ini berdampak bagi kelangsungan Perusahaan tempatnya</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>bekerja yang bergerak di bidang Pariwisata. Diharapkan, Pemerintah Indonesia dapat memberikannya kepada Pemerintah Fiji terkait persoalan ketenagakerjaan ini seperti memberikan pelatihan atau mengirim tenaga terampilnya ke Fiji.</p> <p>Acara ini ditutup dengan makan malam bersama hidangan Indonesia.</p>	
7.	KSI - BKSAP	<i>Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024</i> pada 1-2 September 2024.	<p>BKSAP menjadi tuan rumah dari <i>Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) 2024</i> yang diadakan di Nusa Dua, Bali. Forum Parlemen Indonesia-Afrika yang bertajuk <i>Forging Indonesia-Africa Parliamentary Partnership for Development</i>, atau Menjalin Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan berlangsung dari tanggal 1–2 September 2024 di <i>Grand Ballroom, Grand Hyatt</i> Bali. Acara perdana ini mempertemukan peserta dan panelis dari Indonesia, 22 negara Afrika, dan organisasi internasional yang merupakan upaya signifikan untuk memperkuat kerja sama antar parlemen dan mendorong pembangunan berkelanjutan. IAPF bertujuan untuk mempromosikan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial dengan membangun ikatan historis antara Indonesia dan negara-negara Afrika, yang berakar pada nilai-nilai bersama berupa solidaritas, antikolonialisme, dan kerja sama Selatan-Selatan. Forum ini berupaya untuk mengatasi tantangan kontemporer dan mengeksplorasi peluang pertumbuhan baru melalui dialog terbuka, kemitraan strategis, dan upaya kolaboratif, yang berkontribusi pada masa depan kedua kawasan yang lebih tangguh, adil, dan sejahtera.</p> <p>Forum ini terbagi menjadi Tiga bagian, yakni: Sesi I dengan tema “<i>South-South Cooperation for Prosperity and Sustainable Development</i>,” Sesi II dengan tema “<i>Building Resilient Communities Through Health and Food Security Initiatives</i>,” dan Sesi III dengan tema “<i>Harnessing Trade and Investment Potentials for Inclusive Economic Growth</i>.”</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke RRT pada 3 - 7 September 2024.	<p>BKSAP melakukan kunjungan Diplomasi ke RRT yang dipimpin oleh Dr. Fadli Zon (F.P. Gerindra) pada tanggal 3 - 7 September 2024, dengan delegasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putu Supadma Rudana, (F.PD) Anggota Delegasi 2. Sukamta, (F.PKS) Anggota Delegasi 3. Adriana Charlotte Dondokambey (F-PDIP), Anggota Delegasi 4. Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Anggota Delegasi 5. Dyah Roro Esti Widya Puteri (F-PG), Anggota Delegasi 6. Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP), Anggota Delegasi 7. Ina Ammania (F-PDIP), Anggota Delegasi Ratih Megasari Singkaru (F-PNasdem) Anggota Delegasi <p>Dalam kunjungan tersebut delegasi mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Drs. Djauhari Oratmangun di Beijing, Tiongkok. Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan KBRI di Beijing selama kunjungan diplomasi ini, dan berharap kunjungan diplomasi ini dapat memperkuat dan mengoptimalkan kerja sama antar Indonesia dan Tiongkok yang akan merayakan hubungan diplomatiknya yang ke-75 di tahun depan, di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan juga transisi energi serta transfer teknologi. 2. Pertemuan dengan Vice Chair of the Foreign Affairs Committee of NPC Fu Ziyang beserta delegasi. Pertemuan ini mempunyai tujuan untuk menguatkan kerja sama antar Parlemen, termasuk dalam memecahkan tantangan di level regional 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dan internasional, mengingat NPC adalah <i>Observer AIPA</i>, serta mendiskusikan dan berbagi pengalaman termait berbagai isu yang menjadi prioritas Tiongkok untuk mendorong pembangunan, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, transisi energi, teknologi dan pengembangan UMKM.</p> <p>3. Vice-Minister of International Department of CPC Central Committee, Sun Haiyan, di Beijing, Tiongkok. Pertemuan secara garis besar membahas hubungan Indonesia dan RRT yang telah berkembang <i>menjadi Comprehensive Strategic Partnership</i>, dan telah bekerja sama secara kuat di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, maupun bidang politik dengan adanya dialog dengan partai-partai di Indonesia.</p> <p>Mengingat kedua negara akan merayakan hubungan diplomatik ke-75 di tahun 2025 nanti, delegasi BKSAP DPR RI berharap akan adanya kerja sama yang efektif, saling menghargai dan saling menguntungkan, terutama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama seperti transisi energi, yang dimana membutuhkan, diantara lainnya, investasi dan teknologi yang memadai.</p> <p>Selain itu, delegasi BKSAP DPR RI mendorong partisipasi kuat RRT dalam mempromosikan dan memastikan kawasan yang damai, stabil dan sejahtera, serta mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan upaya untuk membantu memecahkan masalah kemanusiaan di Gaza yang masih berlanjut sampai saat ini.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Pertemuan Vice-Chair Standing Committee of NPC, Mr. Peng Qinghua Mewakili Delegasi BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon mengapresiasi kerja sama yang kuat di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Fadli Zon menyampaikan bahwa RRT adalah salah satu mitra terbesar Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi.</p> <p>Dalam hal ini, kedua negara harus mengoptimalkan pengembangan <i>Regional Comprehensive Economic Corridor</i> dan <i>"Two Countries, Twin Parks"</i>, yang akan lebih mempromosikan perdagangan dan investasi, dan menjadi jembatan bagi kedua perusahaan untuk membangun sinergi.</p> <p>Pertemuan juga menyoroti, di antara lainnya, kerja sama infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan <i>Autonomous Rail Transit</i> di Ibu Kota Nusantara.</p> <p>Delegasi mendorong kerja sama untuk terus berlanjut dan bahkan lebih ditingkatkan, terutama untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara, beserta moda transportasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.</p> <p>Selain itu, perubahan iklim yang dimana telah mengancam kesehatan manusia, juga turut dibahas. Dalam hal ini, Delegasi BKSAP berharap kerja sama untuk transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan dapat menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.</p> <p>5. Pertemuan dengan Sekertaris Jenderal <i>Belt and Road Initiative International Green Development Coalition (BRIGC)</i>, Cui Dandan beserta delegasi</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan membahas berbagai kerja sama Indonesia dan Tiongkok dibawah skema <i>Belt and Road Initiative</i> seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung, serta tugas dan fungsi BRIGC dalam mempromosikan inisiatif dan program hijau.</p> <p>Diharapkan kedepannya kerja sama Indonesia dan Tiongkok di bawah BRI dapat diperkuat dan diperluas untuk transisi energi, termasuk di bidang energi terbarukan, dan menjunjung tinggi prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati.</p> <p>6. Pertemuan bilateral dengan <i>Vice Director of the Standing Committee of the Tianjin Municipal People's Congress, Ma Shunqing.</i></p> <p>Pertemuan ini membahas berbagai kerja sama Indonesia dan Tiongkok, termasuk Tianjin seperti <i>sister-city</i> antara Jawa Timur dan Tianjin.</p> <p>Selain itu, Delegasi juga membahas mengenai pentingnya pengembangan pelabuhan melalui penggunaan teknologi, mengingat <i>Tianjin Port</i> telah menggunakan teknologi kendaraan tanpa pengemudi, jaringan 5G, Kecerdasan Buatan (AI), dan juga didukung oleh energi terbarukan.</p> <p>Sebagai tambahan, Delegasi BKSAP DPR RI juga mengunjungi <i>Tianjin Port dan Great Wall Motors Company (GWM)</i> di Tianjin, Tiongkok.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Intern dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2024.	Membahas surat masuk dan program kerja.	
2.		Kunjungan kerja ke parlemen negara Australia dilaksanakan tanggal 25 Agustus - 31 Agustus 2024.	Dalam rangka mencari masukan dan meninjau langsung Sistem Penegakkan Etika di Parlemen negara dimaksud.	
3.		Paket <i>Meeting</i> di Griya Sabha, Kopo dilaksanakan tanggal 3 - 5 September 2024.	Tema: "Politik Siasat: Analisis Fenomena Penganggaran Etika dan Moral".	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT. Asuransi Jasindo	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 20-22 Agustus 2024 ke Banten. 2. Tanggal 23-25 Agustus 2024 ke Lampung. 3. Tanggal 26-28 Agustus 2024 ke Bandung. 4. Tanggal 29-31 Agustus 2024 ke Banten. 5. Tanggal 1-3 September 2024 ke Manado. 6. Tanggal 4-6 September 2024 ke Makassar. 	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit <i>provider</i> dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
